

sekitar 1% diatas tingkat inflasi umum di bulan Mei 2016, inflasi pada sektor ini naik hingga 100% (y-o-y) sekaligus mencatat level tertinggi dibanding kelompok pengeluaran yang lain. Kelompok pengeluaran yang juga mengalami gejolak yang cukup dramatis selama periode berjalan adalah kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Sempat berkontraksi hingga mencapai titik terendah pada 5,6% dibawah nol, kelompok ini mengalami kenaikan secara cepat selama bulan Juli-Agustus menyentuh level 1,58% dan bertahan pada tingkat yang relatif stabil hingga akhir periode.

Kelompok pengeluaran untuk makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mengalami trend yang menurun hingga 2% pada bulan Mei 2017. Hal yang kontras terjadi pada kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan gas yang mengalami kenaikan dengan besaran dan periode yang sama. Kelompok lain yang mengalami fluktuasi selama periode berjalan adalah kelompok bahan makanan dan transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Keduanya berpotongan di tingkat inflasi yang sama pada akhir periode Mei 2017 pada level hampir menyentuh 4%. Sedangkan kelompok pengeluaran lain, sandang, relatif stabil berada di bawah tingkat inflasi umum di Provinsi Papua Barat. Pengukuran laju inflasi di Provinsi Papua Barat berlokasi di dua tempat, yaitu di Manokwari dan Kota Sorong. Apabila dilihat dari wilayah penyumbanganya, terlihat bahwa penyumbang inflasi terbesar di wilayah Papua Barat adalah Kota Sorong dengan rata-rata tingkat inflasi bulannya adalah sebesar 0,43% atau 6,63% tahunan. Apabila dilihat dari periodenya, tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 di Kota Sorong sebesar 8,16%, sebaliknya di periode yang sama di Manokwari mengalami tingkat inflasi terendah selama tiga tahun terakhir senilai 4,63%. Apabila diamati dari sisi bulan, terlihat bahwa rata-rata inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli hingga Agustus atau berkisar antara 1%-1,5%. Sedangkan rata-rata inflasi terendah terjadi pada bulan Oktober atau rata-rata sebesar -0,58%.

Tabel 2.32 Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong, 2014-2016

Periode	Kabupaten Manokwari			Kota Sorong			Papua Barat		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Januari	-0,07	-0,11	0,32	-0,17	0,17	1,11	-0,15	0,1	0,91
Februari	0,29	0,04	-0,11	0,63	0,26	0,1	0,54	0,2	0,05
Maret	-0,35	0,84	0,13	-0,02	0,27	-0,14	-0,1	0,4	-0,07
April	-0,09	-0,69	-0,17	0,39	0,33	-0,44	0,27	0,08	-0,38
Mei	0,69	0,04	0,64	0,6	0,19	-0,92	0,62	0,15	-0,55
Juni	0,36	1,14	1,77	-0,26	1,9	1,24	-0,11	1,71	1,37

Periode	Kabupaten Manokwari			Kota Sorong			Papua Barat		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Juli	0,91	1,03	1,16	2	2,01	1,15	1,73	1,77	1,15
Agustus	1,82	-1,68	1,27	1,92	0,78	1,27	1,89	0,19	1,27
September	-0,22	0,38	-0,67	0,83	0,21	-0,02	0,59	0,25	-0,18
Oktober	0,41	-0,43	-0,82	-1,08	-0,21	-1,1	-0,72	-0,26	-1,03
November	0,07	0,22	0,93	0,09	-0,74	0,25	0,08	-0,51	0,42
Desember	1,76	2,02	1,18	1,74	0,88	0,45	1,74	1,15	0,63

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

#### 2.2.1.4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *per capita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.

Tren PDRB per kapita di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 2.33, terlihat bahwa PDRB per kapita Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2012, PDRB per kapita Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp 55,04 juta, kemudian meningkat menjadi Rp 63,98 juta pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi Rp 68,46 juta. Selanjutnya pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi Rp 72,16 juta, dan terus meningkat hingga pada tahun 2016 menjadi Rp 74,87 juta. Namun peningkatan PDRB per kapita ini tidak diiringi dengan peningkatan laju pertumbuhan dari PDRB per kapita itu sendiri. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan PDRB per kapita mencapai 8,89%, kemudian turun menjadi 7% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Papua Barat kembali turun menjadi 5,40% dan pada tahun 2016 pun juga menunjukkan adanya tren penurunan menjadi 3,76%. Peningkatan dari PDRB per kapita Provinsi Papua Barat pada setiap tahunnya merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian di Provinsi Papua Barat. Peningkatan

PDRB per kapita tersebut disebabkan pertumbuhan PDRB ADHB lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.33 PDRB Per Kapita Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Konstan, 2012-2016

Rincian	2012	2013	2014	2015
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp Miliar)	44.423,33	52.997,66	58.180,96	62.889,89
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	807,00	828,29	849,81	871,50
<b>PDRB Per Kapita (Rp Juta)</b>	<b>55,04</b>	<b>63,98</b>	<b>68,46</b>	<b>72,16</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017 (diolah)

Melihat wilayah yang berkontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni, maka tidak heran apabila PDRB per kapita tertinggi di Provinsi Papua Barat berada di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong. Tingginya PDRB per kapita pada dua wilayah tersebut disebabkan adanya tambang minyak di Kabupaten Sorong dan tambang *Liquid Natural Gas* (LNG) di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan tambang LNG ini diperkirakan memiliki kandungan gas alam cair yang besar dan termasuk tiga produsen LNG terbesar di Indonesia. Kontributor minyak dan gas (migas) terbesar Provinsi Papua Barat adalah pertambangan LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni. Walaupun pada tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Teluk Bintuni sempat menurun, namun kembali naik secara signifikan menjadi Rp 378.527.849,85 pada tahun 2015 dan tetap menjadikan Kabupaten Teluk Bintuni menjadi kabupaten dengan PDRB per kapita tertinggi di Provinsi Papua Barat. Secara keseluruhan PDRB Kota Sorong dan 11 kabupaten lain yang ada di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan, yang artinya peningkatan penduduk di Provinsi Papua Barat juga diiringi dengan peningkatan pendapatannya.

Tabel 2.34 PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota (Rp), 2011-2015

No.	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
1.	Fakfak	30.381.743,84	31.586.100,31	30.095.137,76	38.372.724,18
2.	Kaimana	25.885.748,50	27.288.210,05	27.579.410,36	27.717.332,23
3.	Teluk Wondama	26.162.220,94	27.513.625,28	27.878.637,71	28.203.638,68
4.	Teluk Bintuni	366.559.930,87	379.046.285,70	373.367.028,07	378.527.849,85
5.	Manokwari	29.247.018,85	31.663.929,12	32.908.527,12	34.211.148,21
6.	Sorong Selatan	21.150.606,45	22.141.767,19	22.820.293,61	23.704.977,23
7.	Sorong	97.806.355,79	95.915.385,79	94.884.352,84	94.727.275,54

No.	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
8.	Raja Ampat	42.171.856,96	43.565.877,71	44.937.186,05	45.359.926,40
9.	Tambrau	7.580.479,45	15.496.617,87	8.327.798,77	8.813.676,09
10.	Maybrat	9.034.175,23	9.331.911,12	9.552.711,67	9.836.076,10
11.	Manokwari Selatan	20.526.838,69	21.210.276,15	21.556.606,52	21.865.705,03
12.	Pegunungan Arfak	3.583.661,27	3.661.192,89	3.818.728,27	3.973.814,16
13.	Kota Sorong	28.751.755,06	31.361.819,21	33.444.984,21	35.744.311,31

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017 (diolah)

### 2.2.1.5. Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan Bank Dunia

Pengukuran tingkat pemerataan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu koefisien gini dan tingkat pemerataan pendapatan menurut Bank Dunia. Koefisien gini atau rasio gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan kumulatif penduduk. Nilai rasio gini antara 0 hingga 1. Apabila nilai rasio Gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila rasio Gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. Rasio Gini dibagi dalam tiga kategori: (a) *Gini Ratio* >0,5 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, (b) *Gini Ratio* 0,3–0,5 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang, dan (c) *Gini Ratio* <0,3 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan rendah.

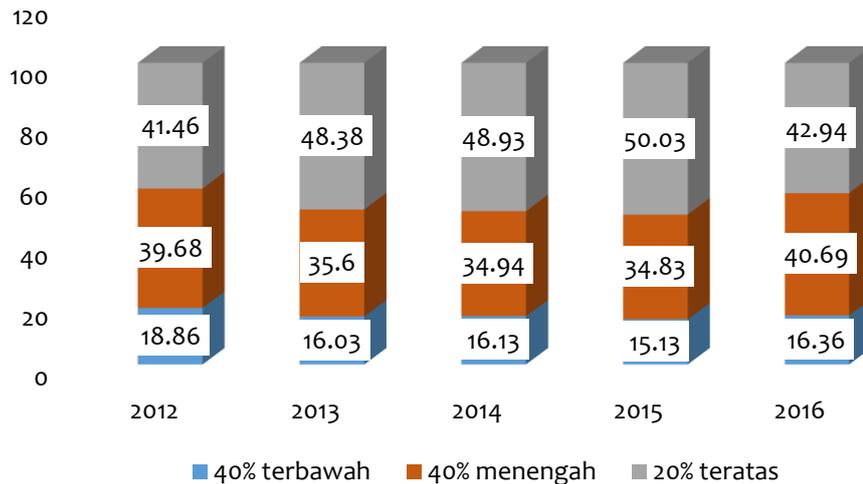
Sedangkan, Bank Dunia menggolongkan penduduk menjadi tiga kelas yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan sedang, 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40% penduduk berpendapatan rendah, kemudian didefinisikan intensitas kemiskinannya dengan kriteria (a) Bila menerima kurang dari 12% dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan tinggi, (b) Bila menerima 12–17% dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan sedang, dan (c) Bila menerima lebih dari 17% dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan rendah.

Tabel 2.35 Angka Gini Rasio menurut Status Wilayah di Provinsi Papua Barat, 2012-2016

Status Wilayah	2012	2013	2014	2015	2016
Perkotaan	0,420	0,391	0,437	0,343	0,326
Pedesaan	0,362	0,388	0,391	0,476	0,376
<b>Papua Barat</b>	<b>0,425</b>	<b>0,431</b>	<b>0,439</b>	<b>0,440</b>	<b>0,373</b>

Sumber: SIPD Papua Barat, 2017 (diolah)

Tabel 2.35 menunjukkan ukuran ketimpangan dengan pendekatan nilai rasio gini. Jika mengacu pada nilai rasio gini, tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi di Provinsi Papua Barat 2012-2016 masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang pada posisi antara 0,3 hingga 0,5. Pada tahun 2012-2016 tren rasio gini Provinsi Papua Barat menunjukkan tren ke arah peningkatan, yang artinya terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang relatif semakin meningkat di Provinsi Papua Barat. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, pada tahun 2016 terjadi penurunan indeks gini sebesar 0,06 dibandingkan pada tahun 2015. Pada Tabel 2.35, terlihat bahwa pada tahun 2013 terjadi peningkatan indeks gini sebesar 0,06 dari 0,425 menjadi 0,431. Kemudian pada tahun 2014 kembali meningkat sebesar 0,008 menjadi 0,439 dan terus meningkat hingga 0,440 pada tahun 2015, dan terjadi penurunan pada tahun 2016 menjadi 0,373. Tren indeks gini pun berbeda pada wilayah perkotaan dan pedesaan setiap tahunnya. Pada tahun 2012-2014, gini rasio daerah perkotaan jauh lebih tinggi daripada daerah pedesaan. Sedangkan pada tahun 2015-2016, gini rasio daerah perkotaan lebih rendah daripada daerah pedesaan. Indeks gini Provinsi Papua Barat pada tahun 2012-2015 berada di atas indeks gini nasional. Namun, penurunan indeks gini pada tahun 2016 membuat Provinsi Papua Barat berada di bawah indeks gini nasional, yang artinya tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi di Provinsi Papua Barat lebih baik dibandingkan dengan nasional.



Gambar 2.33 Perkembangan Distribusi Pengeluaran Menurut Bank Dunia Provinsi Papua Barat, 2012-2016

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017 (diolah)

Apabila dilihat dari tingkat pemerataan Bank Dunia, pada tahun 2012 di Provinsi Papua Barat masih dalam ketimpangan kategori rendah. Hal ini dapat dilihat dari proporsi pengeluaran dari kelompok penduduk 40% terbawah terhadap total pengeluaran penduduk masih di atas 17 persen. Namun, sejak tahun 2013 hingga 2016, proporsi pengeluaran penduduk pada kelompok 40% terbawah mulai mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya yang mulai berada di bawah 17%, yang menandai pergeseran ketimpangan pendapatan dari ketimpangan kategori rendah menjadi ketimpangan kategori sedang. Namun pada tahun 2016 terlihat adanya indikasi pengurangan ketimpangan pendapatan.

#### 2.2.1.6. Persentase Penduduk Miskin

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya di Provinsi Papua Barat, namun telah menjadi permasalahan dunia. Penduduk dikatakan termasuk dalam kategori miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan. Selama periode 2011-2015, garis kemiskinan di Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2011, garis kemiskinan di Provinsi Papua Barat sebesar Rp318.796, kemudian pada 2012

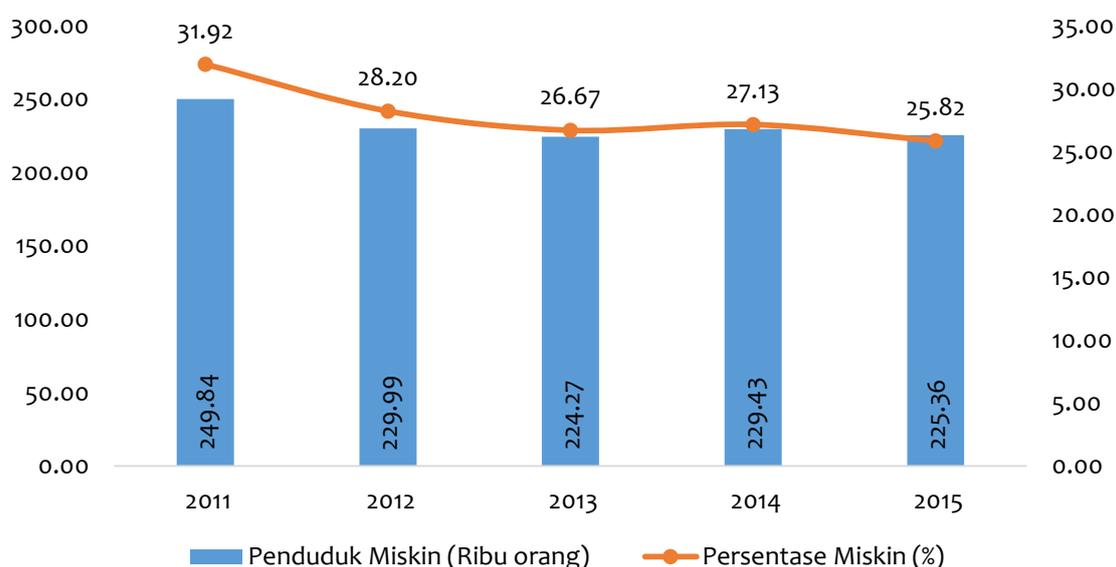
meningkat menjadi Rp333.485. Pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi Rp363.929, kemudian menjadi Rp 397.662 pada tahun 2014 dan terus meningkat hingga tahun 2015 sebesar Rp 441.569. Rata-rata kenaikan garis kemiskinan tahun 2011-2015 sebesar 9,81 persen.

Tabel 2.36 Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Papua Barat, 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Garis Kemiskinan (Rp/bulan)	318.796	333.485	363.929	397.662	441.569

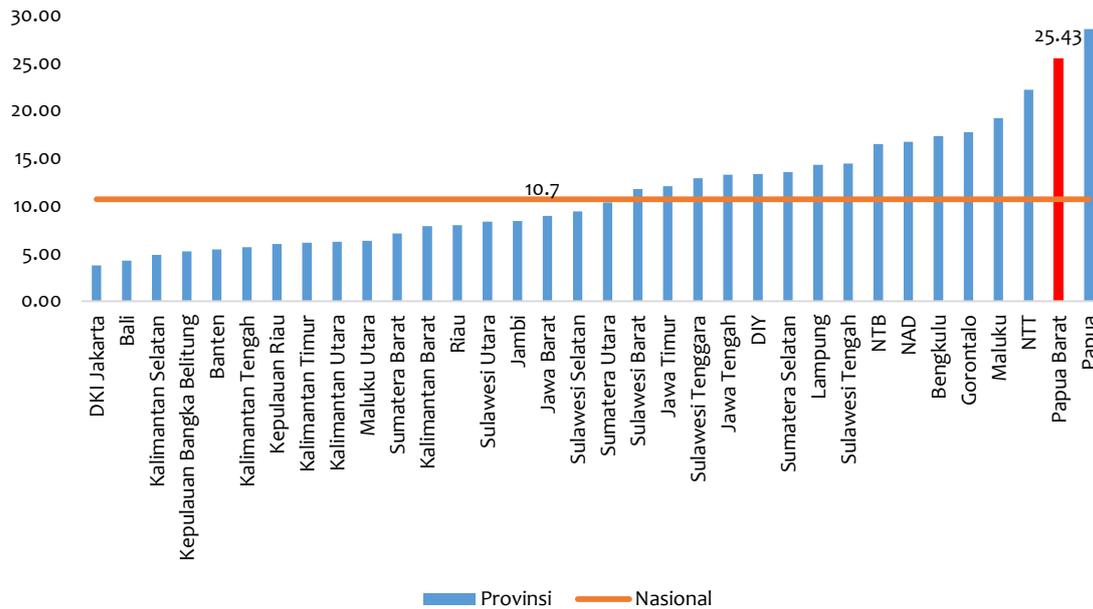
Sumber: SIPD Papua Barat, 2017

Perkembangan penduduk miskin di Provinsi Papua Barat pun menunjukkan hasil yang menggembirakan. Secara umum angka kemiskinan di Papua Barat pada tahun 2012-2015 menunjukkan tren ke arah penurunan, namun sempat terjadi peningkatan pada tahun 2014 sebesar 0,46% dibandingkan tahun 2013. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2014, angka kemiskinan di Papua kembali menurun menjadi 25,82% pada tahun 2015 dan terus menurun hingga 24,88% pada tahun 2016.



Gambar 2.34 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat, 2011-2015

Sumber: SIPD Papua Barat, 2017 (diolah)



Gambar 2.35 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Provinsi, 2016  
 Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017 (diolah)

Selama periode 2011-2016 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan dari sebanyak 249.84 ribu orang pada tahun 2011 menjadi sebanyak 225,36 ribu orang pada tahun 2015. Walaupun terjadi penurunan persentase penduduk miskin, hal tersebut ternyata tetap menempatkan Provinsi Papua Barat pada posisi kedua setelah Provinsi Papua sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, yang diukur dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap-P1*) dan Indeks Keparahannya (*Poverty Severity Index-P2*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2011-2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua Barat menunjukkan adanya penurunan dari 8,78 pada tahun 2011 menjadi 6,20 pada tahun 2015. Hal ini menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekat pada garis kemiskinan. Hasil yang cukup menggembirakan terlihat pada tahun 2015, terjadi kenaikan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan menjadi 6,24, yang menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin jauh dari garis kemiskinan. Hasil yang berlawanan ditunjukkan pada Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2011-2014 terjadi penurunan indeks dari 3,43 menjadi 2,65, kemudian turun kembali menjadi 2,16 pada tahun 2013. Pada tahun 2014 kembali turun menjadi 2,05. Penurunan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa keparahan kemiskinan di Provinsi Papua Barat semakin berkurang. Namun, pada tahun 2015 terjadi kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,28 menjadi 2,33, yang menandakan bahwa keparahan kemiskinan di Provinsi Papua Barat memiliki kecenderungan untuk meningkat.

Tabel 2.37 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Papua Barat, 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	8,78	7,23	6,35	6,20	6,24
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	3,43	2,65	2,16	2,05	2,33

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

#### 2.2.1.7. Tindak Pidana yang Tertangani

Berdasarkan Tabel 2.38, angka kriminalitas terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, jumlah tindak pidana di Provinsi Papua Barat adalah sebanyak 1.825 perkara, kemudian meningkat menjadi 2.262 perkara, selanjutnya turun menjadi 2.039 perkara pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi sebanyak 2.281 perkara. Dari tindak pidana tersebut, jumlah tindak pidana yang diselesaikan oleh kepolisian di wilayah Polda Papua Barat cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, jumlah tindak pidana yang diselesaikan adalah sebanyak 268 perkara (14,68%), kemudian meningkat menjadi 1.619 perkara (71,57%). Dengan jumlah tindak pidana yang turun, jumlah perkara yang diselesaikan juga mengalami penurunan menjadi sebanyak 1.476 perkara (72,39%). Pada tahun 2015, persentase tindak pidana yang diselesaikan sebanyak 551 perkara (24,16%).

Dengan meningkatnya jumlah tindak pidana, pemerintah perlu bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk terus menggalakkan keamanan dan terus melakukan sosialisasi untuk pencegahan tindak kejahatan.

Tabel 2.38 Jumlah Tindak Pidana dan Perkara Pidana yang Diselesaikan di Provinsi Papua Barat, 2011-2015

Tahun	Perkara Pidana	Perkara Pidana Diselesaikan	Persentase (%)
2012	1,825	268	14.68
2013	2,262	1,619	71.57
2014	2,039	1,476	72.39
2015	2,281	551	24.16

Sumber: Papua Barat Dalam Angka, 2016 (diolah)

### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

#### 2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pendidikan adalah berkurangnya penduduk yang buta huruf. Angka melek huruf (*literacy rate*) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Selama periode 2009-2013, perkembangan penduduk yang melek huruf menunjukkan hasil yang menggemberikan dengan adanya persentase peningkatan penduduk yang melek huruf dari 92,34% pada tahun 2009 menjadi 94,14% pada tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat sekitar 5,86% penduduk Provinsi Papua Barat yang berumur 15 tahun ke atas yang masih masih belum/tidak dapat membaca dan menulis.

Tabel 2.39 Tabel Angka Melek Huruf menurut Kabupaten Kota, 2009-2013

No.	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Fakfak	97,18	97,46	98,13	98,47	99,12
2.	Kaimana	95,49	95,50	96,91	96,99	97,49
3.	Teluk Wondama	83,13	84,05	84,18	85,12	85,79
4.	Teluk Bintuni	82,98	85,90	87,05	87,38	87,41
5.	Manokwari	85,67	87,79	88,77	89,03	89,98
6.	Sorong Selatan	88,20	88,32	88,43	88,45	88,56
7.	Sorong	91,40	91,69	91,76	91,84	92,09
8.	Raja Ampat	92,77	93,62	94,13	94,34	94,86
9.	Tambrau	76,38	77,15	77,33	77,38	77,72
10.	Maybrat	89,80	90,73	90,87	91,22	91,41
11.	Manokwari Selatan	-	-	-	-	77,45
12.	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	74,89
13.	Kota Sorong	99,12	99,13	99,14	99,69	99,71
	Papua Barat	<b>92,34</b>	<b>93,19</b>	<b>93,39</b>	<b>93,74</b>	<b>94,14</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2014

Apabila dirinci menurut kabupaten/kota, pada tahun 2013 persentase melek huruf terbesar berada di Kota Sorong sebesar 99,71% dan terendah berada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Terlihat pada tabel di atas bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk yang melek huruf di setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Sedangkan penduduk yang buta huruf diduga didominasi oleh kelompok tersulit dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan keaksaraan. Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun ke atas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun dan faktor eksternal seperti terbatasnya ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka.

#### 2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). RLS pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas. Pada penghitungan metode baru menurut BPS, RLS adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh

suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Rata-rata lama sekolah sangat dipengaruhi oleh partisipasi sekolah untuk semua kelompok umur, sehingga bila angka partisipasi sekolah di Papua Barat rendah maka kemungkinan besar rata-rata lama sekolahnya juga akan rendah.

Angka rata-rata lama sekolah di Papua Barat mengalami tren positif atau meningkat dari tahun ke tahun, walaupun peningkatan ini relatif lambat. Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah Provinsi Papua Barat sebesar 6,82 tahun, kemudian meningkat sebesar 6,87 tahun pada tahun 2012, kembali meningkat pada tahun 2013 sebesar 6,91 tahun. Peningkatan pun terus terjadi pada tahun 2014 sebesar 6,96 tahun, tahun 2015 sebesar 7,01 tahun dan pada tahun 2016 sebesar 7,06 tahun, yang artinya rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP.

Tabel 2.40 Rerata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (tahun), 2011-2016

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fakfak	7,95	7,96	7,97	8,09	8,12	8,22
Kaimana	6,91	7,13	7,36	7,61	7,65	7,83
Teluk Wondama	6,33	6,36	6,43	6,50	6,52	6,57
Teluk Bintuni	6,84	6,98	7,28	7,44	7,45	7,57
Manokwari	7,37	7,47	7,58	7,70	7,75	7,85
Sorong Selatan	6,39	6,50	6,64	6,75	6,84	6,95
Sorong	6,51	6,79	7,06	7,14	7,46	7,57
Raja Ampat	6,52	6,58	7,16	7,32	7,39	7,53
Tambrau	4,15	4,27	4,40	4,53	4,61	4,70
Maybrat	5,89	5,91	5,92	5,96	6,22	6,33
Manokwari Selatan	-	-	6,12	6,20	6,21	6,32
Pegunungan Arfak	-	-	4,79	4,85	4,86	4,90
Kota Sorong	10,36	10,59	10,82	10,86	10,87	10,91
<b>Papua Barat</b>	<b>6,82</b>	<b>6,87</b>	<b>6,91</b>	<b>6,96</b>	<b>7,01</b>	<b>7,06</b>

Sumber: BPS, 2017 (diolah)

Pada tahun 2011-2016 Kota Sorong menjadi kota dengan rata-rata lama sekolah tertinggi sebesar 10,36 tahun pada tahun 2011, 10,59 tahun pada tahun 2012, 10,82 tahun pada tahun 2013, 10,86 tahun pada tahun 2014, 10,87 tahun pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 sebesar 10,91 tahun. Pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah Kota Sorong melebihi rata-rata lama sekolah provinsi sebesar 3,85 tahun. Sedangkan rata-rata lama

sekolah terendah berada di Kabupaten Tambrau sebesar 4,15 tahun pada tahun 2011, 4,27 tahun pada tahun 2012, 4,40 tahun pada tahun 2013, 4,53 tahun pada tahun 2014, 4,61 tahun pada tahun 2015, dan 4,70 tahun pada tahun 2016.

Peningkatan angka rata-rata lama sekolah ini merupakan kabar baik bagi pemerintah, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Kesadaran ini pun perlu ditingkatkan kembali melihat bahwa pertumbuhan RLS di Provinsi Papua Barat yang bergerak secara pelan, dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan formal dan terus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya.

### 2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Peningkatan APK menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan.

Tabel 2.41 Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Papua Barat (%), 2010-2014

Uraian		2010	2011	2012	2013	2014
1.	SD/MI	115,00	104,57	105,21	105,27	109,35
2.	SMP/MTs	66,68	87,63	90,95	87,71	87,86
3.	SMA/MA	72,07	66,74	70,48	73,15	83,11
4.	Perguruan Tinggi	16,80	23,21	25,99	32,34	34,97

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

APK untuk jenjang pendidikan SD selama periode 2010-2014 memiliki tren yang cenderung meningkat, walaupun pada tahun 2011 sempat menurun mencapai 104,57% dari

tahun 2010 sebesar 115%. Namun pada tahun 2012 kembali meningkat sebesar 105,21% hingga pada tahun 2014 mencapai 109,35%. Hal tersebut berarti terdapat penduduk di luar usia sekolah SD (7-12 tahun) yang masih bersekolah SD dimana terlihat dari angka APK SD yang nilainya lebih besar dari 100%. Untuk jenjang pendidikan SMP selama periode 2010-2014 memiliki tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010-2012 mengalami peningkatan dari 66,68% menjadi 90,95%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 87,71% dan kembali meningkat menjadi 87,86% pada tahun 2014, yang artinya persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMP berapapun usianya di antara penduduk berumur 13-15 tahun hanya sebesar 87,86%.

Kemudian untuk APK jenjang SMA selama periode 2010-2014 memiliki tren yang cenderung meningkat, walaupun pada tahun 2011 sempat mengalami penurunan menjadi 66,74% dibandingkan tahun 2010 sebesar 72,07%. Namun kembali meningkat hingga sebesar 83,11% pada tahun 2014, yang artinya persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMA berapapun usianya di antara penduduk berumur 16-18 tahun sebesar 73,18%. Sedangkan untuk APK jenjang perguruan tinggi selama periode 2010-2014 memiliki tren positif atau meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 APK jenjang perguruan tinggi sebesar 16,8% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 34,97%, yang artinya persentase penduduk yang sedang bersekolah di Perguruan Tinggi penduduk di atas usia 18 tahun sebesar 34,97%. Pada tahun 2014 APK tertinggi berada di jenjang SD sebesar 109,35% dan APK terendah berada di jenjang perguruan tinggi. Hal ini mengindikasikan banyakna anak di Provinsi Papua Barat yang tidak meneruskan pendidikannya hingga perguruan tinggi.

Tabel 2.42 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (%), 2014

Kabupaten/Kota	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Perguruan Tinggi
Fakfak	106,51	92,77	102,14	30,50
Kaimana	116,77	80,93	88,25	6,06
Teluk Wondama	121,08	78,77	58,14	20,41
Teluk Bintuni	112,52	81,29	69,78	8,17
Manokwari	104,51	83,56	77,00	56,09
Sorong Selatan	102,50	93,90	82,23	26,79
Sorong	107,41	85,09	98,03	27,05
Raja Ampat	119,03	72,69	71,56	2,82
Tambrau	108,74	86,81	57,00	0,71

Kabupaten/Kota	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Perguruan Tinggi
Maybrat	112,39	107,35	80,81	8,75
Kota Sorong	110,63	94,49	88,50	42,16
<b>Papua Barat</b>	<b>109,36</b>	<b>87,86</b>	<b>83,12</b>	<b>34,98</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Apabila dilihat menurut kabupaten/kota pada tahun 2014, APK untuk jenjang SD tertinggi berada di Kabupaten Teluk Wondama sebesar 121,08% dan terendah berada di Kabupaten Sorong Selatan sebesar 102,50%. Untuk APK jenjang SMP tertinggi berada di Kabupaten Maybrat sebesar 107,35% dan terendah berada di Kabupaten Raja Ampat sebesar 72,69%. Sedangkan APK untuk jenjang SMA tertinggi berada di Kabupaten Fakfak sebesar 102,14% dan terendah berada di Kabupaten Tambrau sebesar 57%. Kemudian APK jenjang perguruan tinggi terbesar berada di Kabupaten Manokwari sebesar 56,09% dan terendah berada di Kabupaten Tambrau sebesar 0,71%. Dari tabel tersebut terlihat bahwa APK terbesar berada pada jenjang sekolah terendah yaitu SD dan terus menurun hingga jenjang perguruan tinggi.

#### 2.2.2.4. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas. Kualitas pendidikan penduduk diketahui dari tingkat pendidikan yang ditamatkan dengan diidentifikasi melalui ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Indikator ini dapat pula digunakan untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengetahui level tertinggi pendidikan antar waktu dan antar wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan maka menggambarkan semakin baik pula kualitas pendidikan manusianya. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya persentase penduduk yang berpendidikan tinggi (SMA ke atas). Biasanya terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin kecil persentase penduduk yang lulus pada level pendidikan tersebut.

Tabel 2.43 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Papua Barat, 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Tidak mempunyai ijazah	26,24	25,81	19,47	24,70	23,20

2.	SD/MI	23,32	22,99	23,82	23,46	22,05
3.	SLTP/MTs	17,49	17,14	19,46	18,33	18,08
4.	SMA/MA	19,42	19,37	21,67	19,65	20,34
5.	SMK	5,17	5,92	5,36	4,61	5,42
6.	Diploma I/II	0,79	0,79	0,67	0,5	0,56
7.	Akademi/Diploma III	1,95	1,74	1,99	1,85	1,64
8.	Diploma IV/Universitas/S2/S3	5,62	6,23	7,56	6,9	8,69
<b>Jumlah</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Berdasarkan tingkat pendidikannya, dapat dilihat selama periode 2010-2014 masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan di Provinsi Papua Barat memiliki porsi terbanyak. Walaupun masyarakat yang tidak mempunyai ijazah sekolah ini memiliki tren yang cenderung menurun, namun penurunan ini cenderung lambat dan tetap menyumbang persentase tertinggi di Provinsi Papua Barat. Terlihat pada tabel pada tahun 2010 hingga 2012 terjadi penurunan dari 26,24% menjadi 19,47%, namun pada tahun 2013 sempat meningkat menjadi 24,70% dan pada tahun 2014 kembali menurun menjadi 23,20%. Sedangkan masyarakat yang memiliki ijazah SD memiliki pola yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011 terjadi penurunan dari 23,32% menjadi 22,99%. Kemudian meningkat hingga pada tahun 2013 mencapai 23,46% dan kembali menurun pada tahun 2014 menjadi 22,05%. Pola yang berbeda ditunjukkan pada jenjang SMP yang memiliki tren yang cenderung menurun, walaupun pada tahun 2012 sempat mengalami kenaikan sebesar 19,46%, namun kembali turun hingga 18,08% pada tahun 2014.

Untuk jenjang SMA memiliki tren yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2011 mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2010 dari 19,42% menjadi 19,37%. Kemudian naik menjadi 21,67% pada tahun 2012, turun kembali pada tahun 2013 menjadi 19,65%, dan kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 20,34%. Pola yang berkebalikan ditunjukkan pada jenjang SMK. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan bila dibandingkan pada tahun 2010 dari 5,17% menjadi 5,92%. Kemudian turun menjadi 4,61% pada tahun 2013 dan kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 5,42%. Sedangkan pada jenjang Diploma I/II memiliki tren yang cenderung menurun, dari 0,79% pada tahun 2010 menjadi 0,56% pada tahun 2014. Tren yang hampir sama juga ditunjukkan pada jenjang Akademi/Diploma III, walaupun pada tahun 2012 sempat mengalami kenaikan menjadi 1,99%, namun kembali menurun hingga pada tahun 2014 menjadi 1,64%. Hal yang berbeda terjadi pada jenjang Diploma IV

yang memiliki tren yang cenderung meningkat, walaupun pada tahun 2013 sempat mengalami penurunan menjadi 6,9%, namun pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 8,69%.

Tabel 2.44 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Papua Barat, 2014

Kabupaten/Kota	Tidak mempunyai ijazah	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	Diploma I/II	Akademi/Diploma III	Diploma IV/Universitas/S2/S3
Fakfak	19,13	22,36	20,60	20,51	4,68	1,11	1,84	9,77
Kaimana	32,12	20,05	19,79	17,55	3,70	0,69	1,45	4,65
Teluk Wondama	27,28	29,53	14,38	14,54	3,95	1,09	2,30	6,92
Teluk Bintuni	26,87	23,74	20,11	17,93	3,83	0,52	1,23	5,78
Manokwari	20,84	18,47	16,62	24,47	5,56	0,42	1,82	11,79
Sorong Selatan	25,78	29,71	15,64	16,05	1,93	1,47	1,27	8,15
Sorong	25,83	25,46	21,22	14,98	6,03	0,37	0,39	5,72
Raja Ampat	29,98	30,35	16,15	13,34	3,10	0,38	1,36	5,33
Tambrauw	44,70	28,52	12,32	10,85	0,99	0,17	0,57	1,87
Maybrat	39,96	24,29	14,90	10,80	0,80	0,26	1,73	7,26
Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Sorong	12,19	18,05	19,50	27,01	10,42	0,35	2,27	10,20

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Apabila dilihat menurut kabupaten/kota pada tahun 2014, masyarakat yang tidak mempunyai ijazah tertinggi berada di Kabupaten Tambrauw sebesar 44,70% dan terendah berada di Kota Sorong sebesar 12,19%. Kepemilikan ijazah untuk jenjang SD tertinggi berada di Kabupaten Raja Ampat sebesar 30,35% dan terendah berada di Kota Sorong sebesar 18,05%. Untuk kepemilikan ijazah jenjang SMP tertinggi berada di Kabupaten Sorong sebesar 21,22% dan terendah berada di Kabupaten Tambrauw sebesar 12,32%. Sedangkan kepemilikan ijazah untuk jenjang SMA tertinggi berada di Kota Sorong sebesar 27,01% dan terendah berada di Kabupaten Tambrauw sebesar 10,85%. Kemudian kepemilikan ijazah jenjang SMK terbesar berada di Kota Sorong sebesar 10,42% dan terendah berada di Kabupaten Maybrat sebesar 0,80%.

Untuk jenjang Diploma I/II tertinggi berada di Kabupaten Sorong Selatan sebesar 1,47% dan terendah berada di Kabupaten Tambrauw sebesar 0,17%. Sedangkan kepemilikan ijazah jenjang Akademi/Diploma III terbesar berada di Kabupaten Teluk Wondama sebesar 2,30% dan terendah berada di Kabupaten Sorong sebesar 0,39%. Untuk kepemilikan ijazah jenjang Diploma IV terbesar berada di Kabupaten Manokwari sebesar 11,79% dan terendah

berada di Kabupaten Tambrau 1,87%. Dalam persebaran kepemilikan ijazah di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat terdapat dua kabupaten yang belum tersedia datanya, yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Dengan masih banyaknya persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah dan hanya bersekolah SD/MI di Provinsi Papua Barat, maka pemerintah provinsi harus meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan pendidikan lanjut di perguruan tinggi. Jumlah lulusan perguruan tinggi yang ada sekarang dirasakan belum cukup memadai mengingat Provinsi Papua Barat memiliki sumberdaya alam yang tinggi. Sebagai wilayah dengan potensi pariwisata yang tinggi, Provinsi Papua Barat membutuhkan kualitas sumberdaya manusia yang baik, sehingga ke depannya, penduduk yang memiliki ijazah pendidikan tinggi diharapkan mampu menjadi tulang punggung pembangunan daerah.

#### 2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM juga menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan cara membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Misal APM SD merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Tabel 2.45 Angka Partisipasi Murni Provinsi Papua Barat (%), 2010-2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/MI	91,91	88,28	88,97	89,94	92,76	92,9
2.	SMP/MT	49,65	57,66	59,76	60,99	68,18	68,29
3.	SMA	43,93	47,88	46,46	54,2	62,29	62,4
4.	Perguruan Tinggi	7,36	13,86	15,75	20,1	24,19	20,55

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

APM untuk jenjang pendidikan SD selama periode 2010-2015 memiliki tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010 APM untuk jenjang SD sebesar 91,91% kemudian

menurun pada tahun 2011 menjadi 88,28%. Kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 88,97% dan terus meningkat hingga tahun 2015 menjadi 92,9%, artinya dari 100 orang yang berusia 7-12 tahun, terdapat sekitar 92 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SD. Untuk APM jenjang SMP selama periode 2010-2015 memiliki tren positif atau meningkat dari tahun ke tahun, tercatat pada tahun 2010 APM Provinsi Papua Barat sebesar 49,65% dan terus meningkat hingga pada tahun 2015 menjadi 68,29%, yang artinya dari 100 orang yang berusia 13-15 tahun, terdapat sekitar 68 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP. Kemudian, pada jenjang SMA selama periode 2010-2015 memiliki tren yang cenderung meningkat, walaupun pada tahun 2012 sempat mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2011, yaitu 47,88% menjadi 46,46%. Namun setelah penurunan tersebut, APM untuk jenjang SMP terus meningkat hingga pada tahun 2015 menjadi 62,4%, yang artinya setiap 100 orang yang berusia 16-18 tahun, terdapat sekitar 62 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA.

Kemudian untuk APM jenjang perguruan tinggi selama periode 2010-2015 memiliki tren yang cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat dari kenaikan APM dari tahun 2010-2014 dari 7,36% menjadi 24,19%, walaupun pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan APM menjadi 20,55%, yang artinya setiap 100 orang yang berusia di atas 18 tahun terdapat sekitar 20 orang bersekolah pada jenjang pendidikan perguruan tinggi. Selain itu dapat dilihat pula tren APM yang semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah pula APM di Provinsi Papua Barat, dapat dilihat bahwa APM tertinggi berada di jenjang SD sebesar 92,9% dan APM terendah berada di jenjang Perguruan Tinggi sebesar 20,55%.

Tabel 2.46 Angka Partisipasi Murni menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (%), 2015

Kabupaten/Kota	SD/MI	SLTP/MTs	SMA	Perguruan Tinggi
Fakfak	91,15	69,56	52,79	11,2
Kaimana	95,94	48,28	48,61	2,57
Teluk Wondama	94,71	47,89	49,59	3,18
Teluk Bintuni	94,85	59,63	55,01	5,87
Manokwari	97,61	69,34	69,22	29,42
Sorong Selatan	96,2	61,41	47,13	22,12
Sorong	91,92	88,49	71,26	18,42
Raja Ampat	95,86	68,72	61,17	4,53
Tambrau	93,38	69,3	43,48	0
Maybrat	86,75	71,83	64,16	18,36
Manokwari Selatan	93,42	62,35	67,71	8,88

Kabupaten/Kota	SD/MI	SLTP/MTs	SMA	Perguruan Tinggi
Pegunungan Arfak	89,09	30,7	6,88	0
Kota Sorong	89,46	75,55	72,91	31,81

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Apabila dilihat menurut kabupaten/kota pada tahun 2015, APM untuk jenjang SD tertinggi berada di Kabupaten Manokwari sebesar 97,61% dan terendah berada di Kabupaten Maybrat sebesar 86,75%. Untuk APM jenjang SMP tertinggi berada di Kabupaten Sorong sebesar 88,49% dan terendah berada di Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 30,7%. Sedangkan APM untuk jenjang SMA tertinggi berada di Kota Sorong sebesar 72,91% dan terendah berada di Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 6,88%. Kemudian APM jenjang perguruan tinggi terbesar berada di Kota Sorong sebesar 31,81% dan terendah berada di Kabupaten Tambrau dan Pegunungan Arfak.

#### 2.2.2.6. Angka Kematian Bayi

Indikator penting terkait dengan kesehatan adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi berpengaruh kepada penghitungan angka harapan hidup waktu lahir ( $e_0$ ) yang digunakan dalam salah satu dimensi pada indeks komposit penyusun indeks pembangunan manusia ditilik dari sisi kesehatan. Angka kematian bayi dapat didekati dari data jumlah anak yang lahir hidup dengan jumlah anak yang masih hidup, namun data tersebut belum tersedia di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan data BPS Provinsi Papua Barat (2017), pada tahun 2014 persentase wanita berumur 10 tahun ke atas yang memiliki jumlah anak lahir hidup sebanyak 1 anak adalah sebesar 20,95%, anak lahir hidup sebanyak 2 orang sebesar 23,46%, anak lahir hidup sebanyak  $\geq 3$  orang sebesar 47,93%, sedangkan yang belum memiliki anak sebesar 7,65%. Sementara itu, persentase wanita yang telah memiliki anak dan belum meninggal hingga tahun 2015 adalah sebesar 82,92%, meninggal sebanyak 1 orang sebesar 10,49%, meninggal sebanyak 2 orang sebesar 3,92%, dan meninggal  $\geq 3$  orang sebesar 2,67%.

Tabel 2.47 Persentase Wanita Berumur 10 Tahun Atau Lebih Menurut Jumlah Anak Lahir Hidup dan Meninggal di Provinsi Papua Barat (%), 2010-2014

Tahun	Jumlah Anak Lahir (orang)			
	0	1	2	$\geq 3$
2010	10,37	20,97	21,01	47,66
2011	9,71	20,08	23,90	46,31

2012	9,03	20,66	24,40	45,92
2013	8,30	20,13	22,46	49,11
2014	7,65	20,95	23,46	47,93
Tahun	Jumlah Anak Meninggal (orang)			
	0	1	2	≥3
2010	85,29	9,24	3,25	2,23
2011	85,72	9,12	2,43	2,71
2012	83,99	10,02	3,73	2,26
2013	81,62	11,26	4,03	3,08
2014	82,92	10,49	3,92	2,67

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

### 2.2.2.7. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semakin tinggi AHH, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Secara umum, angka harapan hidup di kabupaten/kota di Papua Barat mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 angka harapan hidup Provinsi Papua Barat sebesar 64,75 tahun, kemudian meningkat sebesar 64,9 tahun pada tahun 2012, kembali meningkat pada tahun 2014 sebesar 65,1 tahun dan pada tahun 2016 angka harapan hidup Provinsi Papua Barat mencapai 65,3 tahun, yang artinya rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat dapat menjalani hidup hingga 65 tahun. Angka harapan hidup tertinggi tertinggi berada di Kota Sorong sebesar 69,4 tahun dan angka harapan terendah berada di Teluk Wondama sebesar 59 tahun.

Tabel 2.48 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat (tahun), 2011-2016

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fakfak	67,28	67,4	67,4	67,6	67,7	67,8
Kaimana	62,66	62,9	63,2	63,6	63,6	63,8
Teluk Wondama	57,52	57,8	58	58,4	58,7	59
Teluk Bintuni	57,69	57,9	58,1	58,4	59,1	59,5
Manokwari	67,08	67,2	67,3	67,6	67,7	67,8
Sorong Selatan	64,8	65	65,1	65,3	65,4	65,5
Sorong	64,76	64,9	65	65,2	65,3	65,4
Raja Ampat	63,78	63,8	63,8	64,1	64,1	64,2
Tambrau	58,35	58,4	58,5	58,7	59	59,2

Maybrat	64,34	64,4	64,4	64,7	64,7	64,7
Manokwari Selatan	66,14	66,3	66,4	66,7	66,7	66,8
Pegunungan Arfak	66,04	66,2	66,3	66,5	66,5	66,6
Kota Sorong	67,69	67,8	68	69	69	69,4
Papua Barat	64,75	64,9	65,1	65,1	65,2	65,3

Sumber: BPS, 2017 (diolah)

Perkembangan angka harapan hidup per tahun di Papua Barat tercatat tidak melebihi dari satu tahun dalam satu periode jangka waktu satu tahun. Hal ini berarti bahwa kondisi angka ke-matian bayi (*infant mortality rate*) di Papua Barat termasuk dalam kategori *Hardrock*, artinya dalam waktu satu tahun penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi, implikasinya adalah angka harapan hidup yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk mengalami kemajuan. Hal ini terlihat dari perkembangan angka harapan hidup yang tidak melebihi satu digit dalam kurun waktu satu tahun. Kondisi tersebut juga terjadi untuk kondisi nasional, penurunan angka kematian bayi terjadi secara gradual bahkan mengarah melambat.

#### 2.2.2.8. Rasio Penduduk yang Bekerja

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah persentase penduduk yang bekerja. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial karena menyangkut banyak hal. Dimensi ekonomi yang dimaksud adalah bahwa tanpa adanya pekerjaan sebagai sumber penghasilan rumah tangga, akan mengancam kelangsungan hidup anggota rumah tangganya. Sedangkan dimensi sosial yang dimaksud adalah bahwa makin banyaknya anggota masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau makin banyaknya penganggur akan menjadi potensi untuk melakukan tindak kejahatan atau tindakan lain yang akan mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak

pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Persentase penduduk yang bekerja ini dapat dilihat dengan perhitungan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dimana angkatan kerja yang sudah bekerja dibandingkan dengan seluruh angkatan kerja. Angkatan kerja (*labour force*) adalah penduduk usia yang bekerja atau bekerja namun sementara tidak bekerja, termasuk di dalamnya pengangguran. Dengan menggunakan TPAK maka akan terlihat rasio angkatan kerja yang sudah bekerja dibandingkan dengan yang belum bekerja.

Tabel 2.49 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Barat (%), 2010-2014

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Fakfak	54,00	70,69	65,33	61,20	62,31
Kaimana	72,35	72,51	76,04	68,81	69,05
Teluk Wondama	76,50	72,53	70,08	68,82	80,08
Teluk Bintuni	75,40	73,70	69,96	71,12	69,69
Manokwari	78,78	70,03	74,02	71,88	73,51
Sorong Selatan	66,50	72,10	72,74	72,71	71,90
Sorong	70,21	73,35	62,57	62,88	68,59
Raja Ampat	62,29	72,39	64,60	65,99	65,55
Tambrau	77,84	74,17	82,93	70,58	62,31
Maybrat	76,00	71,09	63,48	-	-
Manokwari Selatan	-	-	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-
Kota Sorong	62,07	68,58	59,00	-	-
Papua Barat	<b>69,29</b>	<b>70,78</b>	<b>67,12</b>	<b>66,41</b>	<b>68,30</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Selama periode 2010-2014, TPAK Provinsi Papua Barat memiliki tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010 TPAK Provinsi Papua Barat sebesar 62,29%, kemudian naik menjadi 70,78% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi 67,12% dan terus menurun hingga 66,41% pada tahun 2013. Selanjutnya, meningkat pada tahun 2014 menjadi 68,30%, yang artinya pada tahun 2014 terdapat 68,30% angkatan kerja di Provinsi Papua Barat yang memiliki pekerjaan. Cukup disayangkan beberapa tahun terakhir terdapat 4 kabupaten/kota yang belum ada data TPAK, yaitu Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong. Menurut data terakhir, Kabupaten Teluk Wondama merupakan kabupaten penyumbang terbesar nilai TPAK di Provinsi Papua Barat.

Tren TPAK Provinsi Papua Barat yang cukup fluktuatif ini mungkin salah satunya disebabkan beberapa lapangan pekerjaan memiliki spesifikasi khusus untuk para pencari kerja, sehingga pemerintah provinsi harus memfasilitasi para angkatan kerja yang belum bekerja ini dengan keterampilan agar angkatan kerja ini dapat sesuai dengan spesifikasi pekerja yang dicari di Provinsi Papua Barat.

### 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Provinsi Papua Barat memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya yang cukup besar dengan potensi budaya dan nilai-nilai tradisi yang telah mengakar. Kebijakan pembangunan seni dan kebudayaan diarahkan dalam rangka memperkuat, mengembangkan, dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat daerah, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau tidak sesuai dengan budaya lokal. Provinsi Papua Barat memiliki keindahan destinasi wisata alam yang luar biasa dengan multikulturalisme penduduk yang tinggal di daerah ini. Multikulturalisme yang ada di Provinsi Papua Barat dapat dilihat dari keragaman suku yang berjumlah 67 suku dan keragaman bahasa yang mencapai 310 bahasa yang menghasilkan beranekaragam kebudayaan. Daya tarik wisata budaya ini berpotensi menjadi salah satu keunggulan lokal yang mampu membuat Provinsi Papua Barat sebagai destinasi wisata tujuan utama turis asing dan domestik. Namun keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala pengembangan seni budaya.

Peran pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai pelaksana pembangunan yang nantinya diharapkan menciptakan iklim yang nyaman agar pelaku usaha di bidang kebudayaan dan pariwisata dapat berkembang secara efektif dan efisien. Terkait dengan sektor pariwisata secara khusus, sektor tersebut diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena memiliki *multiplier effect* yang tinggi. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk menarik minat pengunjung. Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Di bidang kepemudaan dan olah raga, pemerintah terus melakukan peningkatan fasilitas dan pembina terhadap pemuda dan cabang olah raga, mulai dari pembinaan pelatih dan fasilitasi kegiatan olah raga hingga pengembangan kapasitas SDM pemuda. Jumlah lapangan olah raga pada tahun 2014 sebanyak 1.174 lapangan yang terdiri dari 328 lapangan sepak bola, 664 lapangan voli, 86 lapangan bulu tangkis, 31 lapangan basket, 20 lapangan tenis, 42 lapangan futsal, dan 3 kolam renang. Namun, tidak semua kabupaten/kota memiliki lapangan ini. Belum meratanya ketersediaan lapangan olah raga di masing-masing kabupaten/kota merupakan salah satu kendala bagi perkembangan atlet-atlet Papua Barat.

Keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala bagi pengembangan seni budaya dan olah raga, misalnya belum ada gedung kantor, gedung kesenian dan olah raga yang representatif. Jadi, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, fasilitas serta sarana prasarana di bidang kepemudaan dan olah raga menjadi sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan di masa mendatang.

### **2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM**

#### **2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib**

##### **2.3.1.1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan komponen strategis dalam upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah sebagaimana tertuang dalam buku III RPJMN 2015-2019 melalui transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satu upaya nyata dalam rangka menciptakan cita-cita tersebut adalah melalui peningkatan kualitas kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan cerdas (*skilled labour*) merupakan modal utama untuk merintis terbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster industri.

#### **Jumlah Sekolah**

Sekolah merupakan salah satu fasilitas pendidikan yang akan menunjang kualitas dan mutu masyarakat. Tersedianya sekolah yang mampu menjangkau dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi prioritas utama. Distribusi penyebaran sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Secara total terdapat

1.576 sekolah di Provinsi Papua Barat dalam berbagai jenjang pendidikan dari TK hingga Perguruan Tinggi, dengan persebaran 289 TK/RA/BA, 835 sekolah dasar, 233 SMP/MTs, 102 SMU/MA, 39 SMK, 29 akademi/perguruan tinggi, 3 sekolah luar biasa, 19 pondok pesantren, 21 madrasah diniyah, serta 6 seminari dan sejenisnya.

Tabel 2.50 Jumlah Sekolah menurut Level Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat (unit), 2014

Kabupaten/Kota	TK/RA/BA	SD/MI	SMP/MTs	SMU/MA	SMK	Akademi/ Perguruan Tinggi	Sekolah Luar Biasa	Pondok Pesantren	Madrasah Diniyah	Seminari/ Sejenisnya
Fakfak	34	99	18	7	3	5	-	1	1	1
Kaimana	18	72	13	1	3	-	-	1	2	-
Teluk Wondama	12	48	9	2	2	-	-	-	-	-
Teluk Bintuni	55	70	30	10	2	1	-	1	1	-
Manokwari	34	70	24	10	4	5	1	7	7	1
Sorong Selatan	13	69	16	5	6	3	1	1	1	-
Sorong	31	100	33	23	5	2	-	6	6	2
Raja Ampat	39	98	29	16	2	-	-	-	1	-
Tambrau	5	41	11	3	1	-	-	-	-	-
Maybrat	7	53	12	2	1	-	-	-	-	-
Manokwari Selatan	11	33	7	5	1	4	-	-	1	-
Pegunungan Arfak	12	53	12	3	-	-	-	-	-	-
Kota Sorong	18	29	19	15	9	9	1	2	1	2
Papua Barat	289	835	233	102	39	29	3	19	21	6

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2014

Selain itu, persebaran jumlah sekolah pada setiap level pendidikan pun tidak merata. Terlihat bahwa jumlah sekolah terbanyak berada pada level sekolah dasar sebanyak 835 sekolah dan sekolah luar biasa menjadi jumlah sekolah paling sedikit di Provinsi Papua Barat sebanyak 3 sekolah. Ketidakmerataan ini juga memiliki kecenderungan tren jumlah sekolah yang menurun apabila dilihat berdasarkan jenjang pendidikannya. Hal ini berarti semakin tinggi jenjang atau level pendidikannya, maka jumlah sekolah akan cenderung semakin sedikit. Tak hanya pada level pendidikan, persebaran sekolah di masing-masing kabupaten/kota juga masih belum merata. Jumlah sekolah paling banyak terdapat di Kota Sorong sebanyak 208 sekolah dalam berbagai level pendidikan, sedangkan jumlah paling

sedikit terdapat di Kabupaten Tambrauw sebanyak 61 sekolah dalam berbagai level pendidikan.

### Rasio Guru terhadap Ketersediaan Sekolah

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio jumlah ketersediaan sekolah dengan jumlah tenaga pendidik pada sekolah tersebut. Banyak sedikitnya jumlah tenaga pendidik pada sebuah sekolah sangat penting mengingat bahwa para pengajar atau tenaga pendidik inilah yang bertanggung jawab atas mutu pendidikan pada sekolah tersebut. Tren rasio ketersediaan sekolah dan tenaga pendidik/guru di Provinsi Papua Barat cenderung fluktuatif. Pada jenjang TK, tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 3, kemudian kembali turun tahun 2013 menjadi 2, dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 3. Kemudian pada jenjang SD/MI pada tahun 2011 hingga 2014 mengalami peningkatan hingga mencapai 9, namun pada tahun 2015 turun menjadi 8.

Tabel 2.51 Rasio Guru terhadap Ketersediaan Sekolah di Provinsi Papua Barat (orang/sekolah), 2011-2015

Tahun	TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	Perguruan Tinggi
2011	2	5	11	13	14	41
2012	3	5	9	11	10	41
2013	2	5	11	12	15	54
2014	2	9	12	12	13	60
2015	3	8	14	18	25	37

Sumber: Statistik Indonesia, 2016

Tren yang hampir serupa juga terjadi pada jenjang pendidikan yang lain. Hal ini menandakan bahwa kualitas pelayanan pendidikan di Provinsi Papua Barat tidak stabil karena jumlah guru yang mengajar di sekolah tidak stabil jumlahnya, kadang tinggi kadang rendah. Rasio tertinggi berapa pada tahun 2014 pada jenjang perguruan tinggi sebesar 60, yang artinya dalam setiap satu perguruan tinggi terdapat guru/tenaga pendidik sebesar 60 orang. Kemudian rasio terendah terdapat pada jenjang TK sebesar 2, yang artinya setiap satu TK memiliki 2 guru.

### Rasio Penduduk Usia Sekolah terhadap Ketersediaan Sekolah

Rasio penduduk usia sekolah terhadap ketersediaan sekolah adalah rasio yang menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah yang dapat ditampung per satu sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa banyak jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan yang harus difasilitasi apabila semua penduduk usia sekolah memutuskan untuk bersekolah. Rasio tertinggi di Provinsi Papua Barat terdapat pada jenjang pendidikan perguruan tinggi sebesar 5.285 penduduk/sekolah pada tahun 2012, yang artinya satu perguruan tinggi harus dapat menampung 5.285 murid apabila semua penduduk usia sekolah jenjang perguruan tinggi memutuskan untuk bersekolah.

Tabel 2.52 Rasio Penduduk Usia Sekolah terhadap Ketersediaan Sekolah di Provinsi Papua Barat (orang/sekolah), 2011-2015

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK	Perguruan Tinggi
2011	139	699	434	4.450
2012	132	563	364	5.285
2013	128	566	357	4.303
2014	125	502	304	3.478
2015	139	502	268	3.340

Sumber: Statistik Indonesia, 2016

Apabila dilihat dari rasio murid terhadap ketersediaan sekolah yang sudah ada di Provinsi Papua Barat, posisi tertinggi masih berada pada jenjang pendidikan perguruan tinggi dengan rasio sebesar 1.052 murid/sekolah pada tahun 2012. Rasio penduduk usia sekolah terhadap ketersediaan sekolah dan rasio murid terhadap ketersediaan sekolah pada setiap jenjang pendidikan menunjukkan perlu ditingkatkannya fasilitas pendidikan, yaitu pembangunan sekolah pada setiap jenjang pendidikan terutama jenjang perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan beban perguruan tinggi yang harus menampung ribuan murid apabila semua penduduk usia sekolah ingin melanjutkan pendidikannya hingga jenjang ini.

Tabel 2.53 Rasio Murid terhadap Ketersediaan Sekolah di Provinsi Papua Barat (orang/sekolah), 2011-2015

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK	Perguruan Tinggi
2011	131	203	284	815
2012	126	175	245	1.052
2013	123	188	257	1.033
2014	121	169	243	1.032

2015	135	161	215	1.001
------	-----	-----	-----	-------

Sumber: Statistik Indonesia, 2016

### Rasio Murid terhadap Guru

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio murid terhadap guru. Semakin kecil rasio ini menandakan bahwa pelayanan pendidikan di daerah tersebut semakin baik. Tren yang sama ditunjukkan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK yang memiliki tren yang cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas pelayanan pendidikan karena jumlah guru yang menanggung sejumlah murid menjadi semakin banyak. Pada tahun 2015 rasio SD/MI mencapai 18 murid/guru, kemudian SMP/MTs mencapai 12 murid/guru, dan SMA/SMK mencapai 11 murid/guru. Namun tren yang berbeda ditunjukkan pada jenjang perguruan tinggi yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012 hingga 2014 sempat terjadi penurunan dari 26 menjadi 17 murid/guru, namun kenaikan kembali terjadi pada tahun 2015 hingga 27 murid/guru. Hal ini menunjukkan penurunan pelayanan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi karena sedikitnya guru yang ada menyebabkan setiap guru harus bertanggung jawab atas 27 muridnya.

Tabel 2.54 Rasio Murid terhadap Guru di Provinsi Papua Barat (murid/guru), 2011-2015

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK	Perguruan Tinggi
2011	27	19	21	20
2012	27	19	23	26
2013	27	17	20	19
2014	13	15	20	17
2015	18	12	11	27

Sumber: Statistik Indonesia, 2016

### Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Indikator ini mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar. APS dikelompokkan dalam empat level pendidikan sesuai dengan kelompok usianya, yaitu SD/MI (7-12 tahun), SMP/MTs (13-15 tahun), SMA/SMK (16-18 tahun), dan Perguruan Tinggi (19-24 tahun). APS di Provinsi Papua Barat memiliki tren positif pada setiap level pendidikan, yang artinya terdapat peningkatan persentase APS dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 APS SD/MI sebesar 94,38% kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2015

menjadi 96,74%. APS SMP/MTs juga meningkat dari 88,59% menjadi 96,58% pada tahun 2015. APS SMA/SMK dari 65,40% meningkat menjadi 79,99% pada tahun 2015, dan APS perguruan tinggi meningkat dari 18,31% menjadi 29,96 persen. Terlihat dari jumlah persentase APS ini bahwa APS terbesar berada pada level SD/MI, yang artinya penduduk usia antara 7 hingga 9 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD/MI sebesar 96,74% dan terdapat 3,26 persen penduduk usia 7 hingga 9 tahun yang tidak bersekolah pada tahun 2015.

Tabel 2.55 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah (%), 2011-2015

APS Penduduk Usia Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
APS SD/MI (7-12 tahun)	94.38	95.56	95.58	96.65	96.74
APS SMP/MTs (13-15 tahun)	88.59	91.65	92.81	96.28	96.58
APS SMA/SMK (16-18 tahun)	65.40	67.18	72.04	79.87	79.99
APS Perguruan Tinggi (19-24 tahun)	18.31	19.90	24	29.66	29.96

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Walaupun terjadi peningkatan pada masing-masing kategori APS tiap tahunnya, namun peningkatan ini tidak diiringi dengan peningkatan APS apabila dilihat dari level pendidikannya. Terlihat bahwa semakin tinggi level pendidikannya, maka APSnya akan semakin menurun. Bahkan APS perguruan tinggi pada tahun 2015 tidak mencapai 50% dan hanya mencapai 29,96%, yang artinya 70,04% penduduk usia antara 19 hingga 24 tahun memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi.

Apabila dilihat dari kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, APS SD/MI dan APS SMP/MTs tidak terdapat perbedaan yang menonjol antar kabupaten/kota. Hal ini disebabkan jumlah sekolah dasar yang telah tersebar hampir merata di semua kabupaten/kota., serta adanya program wajib belajar 9 tahun. Sedangkan untuk APS SMA/SMK dan APS perguruan tinggi masih didominasi di Kota Sorong dan Manokwari.

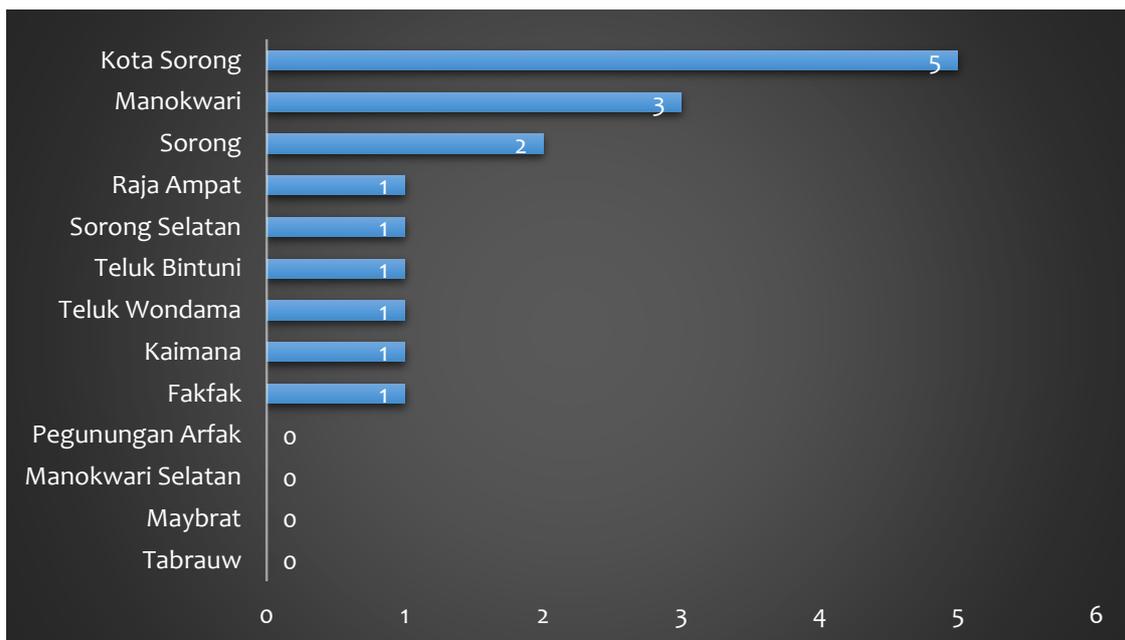
### 2.3.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam suatu pembangunan, hal ini juga sesuai dengan amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang hak setiap orang untuk memperoleh akses dan pelayanan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan suatu investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tercapai kualitas SDM dengan derajat kesehatan yang lebih baik. Keberhasilan dalam melakukan

pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata. Hal ini tercantum dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Untuk mencapainya, dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

### Fasilitas Kesehatan

Tersedianya fasilitas kesehatan dan pelayanan yang mampu menjangkau dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat merupakan prioritas utama dalam pembangunan kesehatan. Salah satu fasilitasnya adalah rumah sakit. Semakin meratanya distribusi rumah sakit di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan Gambar 2.36 terlihat bahwa pada tahun 2015 belum semua kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat memiliki rumah sakit.

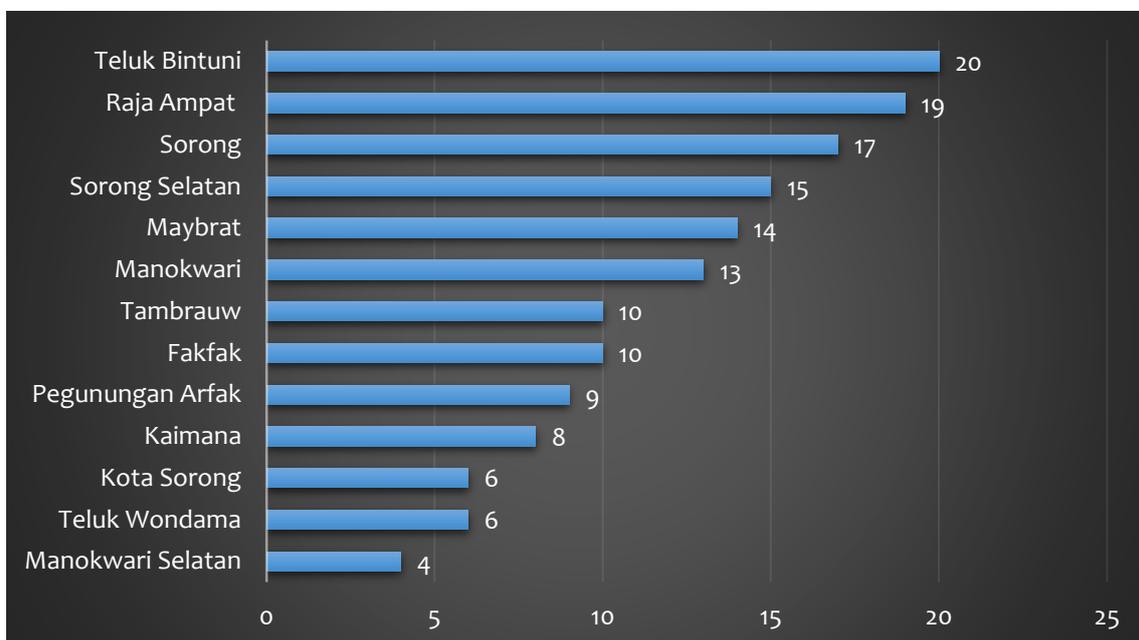


Gambar 2.36 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat (unit), 2015  
Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2016 (diolah)

Pada tahun 2015 terdapat 16 rumah sakit di Provinsi Papua Barat, yang terdiri dari 5 rumah sakit di Kota Sorong, 3 rumah sakit di Kabupaten Manokwari, 2 rumah sakit di

Kabupaten Sorong, dan masing-masing satu rumah sakit di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Fakfak. Terdapat empat Kabupaten yang tidak memiliki fasilitas rumah sakit sama sekali, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Tambrauw. Keempat kabupaten ini merupakan kabupaten-kabupaten yang baru dimekarkan.

Selain rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya yang juga berperan penting adalah puskesmas. Berbeda dengan rumah sakit, puskesmas sudah menyebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2015, total jumlah puskesmas di Provinsi Papua Barat terdapat 151 puskesmas, dengan jumlah puskesmas terbanyak berada di Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 20 puskesmas dan jumlah puskesmas paling sedikit berada di Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 4 puskesmas.



Gambar 2.37 Jumlah Puskesmas di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat (unit), 2015  
Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2016 (diolah)

### Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan atau tenaga medis merupakan salah satu indikator penting, setelah tersedianya fasilitas kesehatan. Tenaga medis inilah yang nantinya akan melakukan pengobatan dan penanganan medis. Namun, persebaran tenaga medis ini belum merata di Provinsi Papua Barat, terutama di kabupaten-kabupaten

pemerakaran. Tercatat sebanyak 236 dokter di Provinsi Papua Barat, yang terdiri dari 67 dokter ahli, 141 dokter umum, dan 28 dokter gigi. Dari ketiga kategori tersebut, jumlah dokter terbanyak berada di Kota Sorong sebanyak 127 dokter. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi tidak optimal karena tenaga medis cenderung lebih terkonsentrasi di kabupaten/kota yang sudah ramai dan memiliki fasilitas yang lebih memadai. Sedangkan untuk daerah yang memiliki akses yang relatif lebih sulit jarang sekali dapat ditemui tenaga medis walaupun fasilitas seperti puskesmas sudah tersedia.

Tabel 2.56 Jumlah dan Jenis Dokter Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat (orang), 2014

Kabupaten/Kota	Dokter Ahli	Dokter Umum	Dokter Gigi	Jumlah
Fakfak	1	19	5	25
Kaimana	0	10	2	12
Teluk Wondama	-	6	2	8
Teluk Bintuni	4	38	4	46
Manokwari	-	16	3	19
Sorong Selatan	-	-	-	-
Sorong	-	-	-	-
Raja Ampat	4	23	3	30
Tambrau	-	-	-	-
Maybrat	-	-	-	-
Manokwari Selatan	-	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	-	-
Kota Sorong	58	55	14	127
Papua Barat	<b>67</b>	<b>141</b>	<b>28</b>	<b>236</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (Data Rumah Sakit), 2014

Keterbatasan tenaga medis ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, mengingat jumlah dokter tersebut sudah termasuk dokter dengan status pegawai tidak tetap. Mereka hanya memiliki masa bakti sekitar 6 bulan, dan setelah masa bakti itu berakhir mereka dapat kembali ke daerahnya masing-masing. Jumlah dokter di Provinsi Papua Barat ini akan mencerminkan tingkat pelayanan kesehatan yang ada. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan rasio jumlah penduduk terhadap jumlah dokter. Semakin besar rasio tersebut, maka semakin banyak penduduk yang harus dilayani, yang artinya akan semakin besar penduduk yang tidak akan terlayani. Rasio ini berasumsi bahwa setiap penduduk yang memiliki keluhan kesehatan akan tertangani oleh dokter dan semua

penduduk memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kesempatan pengobatan dari dokter tanpa memperhatikan faktor-faktor lain, seperti kondisi ekonomi.

Pada tahun 2014 terlihat bahwa rasio jumlah penduduk terhadap dokter sangat tinggi. Secara umum, rasio di Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 sebesar 3.601, yang artinya sekitar 3.601 penduduk akan diobati oleh 1 dokter. Rasio terbesar berada di Kabupaten Kaimana yaitu 4.373 penduduk/dokter. Adapula kabupaten yang tidak tercapuk layanan tenaga medis, seperti Kabupaten Tambrauw. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan oleh dokter, maka penduduk di beberapa kabupaten ini harus menuju kabupaten yang memiliki fasilitas tenaga medis.

Tabel 2.57 Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat, 2014

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Dokter (orang)	Rasio Penduduk/Dokter
Fakfak	72.189	25	2.888
Kaimana	52.473	12	4.373
Teluk Wondama	29.098	8	3.637
Teluk Bintuni	57.992	46	1.261
Manokwari	154.296	19	8.121
Sorong Selatan	42.028	-	-
Sorong	78.698	-	-
Raja Ampat	45.310	30	1.510
Tambrauw	13.497	-	-
Maybrat	36.601	-	-
Manokwari Selatan	21.282	-	-
Pegunungan Arfak	27.616	-	-
Kota Sorong	218.799	127	1.723
<b>Papua Barat</b>	<b>849.809</b>	<b>236</b>	<b>3.601</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (Data Rumah Sakit), 2014

### Penolong Kelahiran

Indikator penting terkait dengan kesehatan adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi ini akan berpengaruh kepada perhitungan angka harapan hidup waktu lahir. Sementara itu, salah satu aspek penentu besar kecilnya angka kematian bayi adalah penolong kelahiran. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik dibandingkan

yang ditolong oleh dukun, keluarga atau lainnya. Penolong kelahiran tidak hanya terkait dengan angka kematian bayi saja, namun juga angka kematian ibu sebagai risiko proses kelahiran. Dalam proses kelahiran bayi tidak dapat dipisahkan antara kemungkinan keselamatan ibu atau anak yang dilahirkan. Keduanya harus diselamatkan dalam risiko besar sebuah kelahiran. Provinsi Papua Barat sebagian besar kelahiran bayi dibantu oleh bidan sebesar 47,02%, persentase ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 51,84%. Penolong kelahiran dokter meningkat dari 17,8% menjadi 25% pada tahun 2015. Secara umum masyarakat masih dominan menggunakan jasa penolong kelahiran yang terlatih, seperti dokter dan bidan.

Fenomena kelahiran dengan menggunakan jasa dukun juga masih terjadi di Provinsi Papua Barat dengan persentase sebesar 13,56 persen. Hal ini terjadi di daerah-daerah yang memang tidak terjangkau oleh tenaga kesehatan. Namun dengan proporsi persentase penolong kelahiran yang masih didominasi oleh tenaga kesehatan yang ahli menandakan bahwa pemahaman masyarakat untuk menggunakan jasa tenaga kesehatan terlatih masih baik, sehingga resiko kematian bayi maupun ibu dapat ditekan. Hal ini tentunya akan menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu.

Tabel 2.58 Persentase Balita Menurut Provinsi dan Penolong Kelahiran Terakhir Provinsi Papua Barat (%), 2011-2015

Penolong Kelahiran	2011	2012	2013	2014	2015
Dokter	11,75	17,15	16,67	17,8	25,00
Bidan	37,74	53,87	49,75	51,84	47,02
Tenaga Medis Lain	3,29	4,97	3,04	3,64	5,28
Dukun	11,76	14,64	18,35	15,43	13,56
Famili	32,59	8,86	11,59	10,88	5,28
Lainnya	2,87	0,5	0,59	0,41	7,81

Sumber: Statistik Indonesia, 2016 (diolah)

Upaya yang mungkin untuk meningkatkan angka persalinan oleh tenaga medis adalah dengan meningkatkan jumlah bidan dan menempatkan mereka di puskesmas/pustu di distrik/kampung-kampung. Alternatif lainnya adalah dengan melatih tenaga-tenaga dukun bersalin agar lebih terampil menolong persalinan dengan menggunakan peralatan yang lebih bersih dan higienis. Dengan pelatihan ini diharapkan tingkat kematian ibu dan anak dalam proses persalinan dapat diminimalisir.

## Imunisasi Balita

Indikator imunisasi balita digunakan untuk menggambarkan tingkat pelayanan imunisasi lengkap terhadap balita. Pemberian imunisasi pada balita sangat perlu dalam menjaga kekebalan pada tubuh balita dari berbagai macam penyakit. Imunisasi yang diberikan pada balita di antaranya adalah imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B. Pemberian imunisasi merupakan salah satu cara untuk mencegah balita terkena penyakit atau meninggal karena penyakit tersebut.

Pada tahun 2015 persentase balita yang mendapatkan imunisasi cukup tinggi di masing-masing jenis, yaitu imunisasi BCG sebesar 81,83%, imunisasi DPT sebesar 73,53%, imunisasi campak sebesar 65,73 persen, dan imunisasi hepatitis b sebesar 69,98%.

Tabel 2.59 Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Provinsi Papua Barat (%), 2015

Kabupaten/Kota	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B
Fakfak	97,77	94,14	98,35	86,59	90,62
Kaimana	83,5	73,79	83,60	62,55	73,91
Teluk Wondama	77,97	59,93	75,13	51,82	57,58
Teluk Bintuni	89,13	83,53	89,23	76,91	83,94
Manokwari	83,17	65,80	76,00	60,03	58,21
Sorong Selatan	83,02	82,39	80,79	74,42	69,59
Sorong	90,38	89,41	96,04	76,71	89,28
Raja Ampat	79,23	65,21	74,24	56,47	58,46
Tambrau	71,51	63,22	73,46	46,83	60,93
Maybrat	92,53	82,30	97,26	64,66	79,57
Manokwari Selatan	45,01	35,77	47,62	29,91	32,72
Pegunungan Arfak	16,75	17,99	16,75	14,62	13,32
Kota Sorong	79,56	75,66	80,07	70,15	74,40
Papua Barat	<b>81,83</b>	<b>73,53</b>	<b>80,44</b>	<b>65,73</b>	<b>69,98</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Tingkat kesadaran tertinggi terdapat pada jenis imunisasi BCG, sedangkan terendah terdapat pada imunisasi campak. Kesadaran untuk melakukan imunisasi ini sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tua. Perlu diketahui juga bahwa kelima jenis imunisasi ini merupakan imunisasi yang harus dilakukan dan bukan memilih salah satu jenis imunisasi saja, yang disebut imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar lengkap adalah pemberian lima vaksin imunisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk bayi dibawah satu tahun. Imunisasi lengkap tersebut yaitu: (1) Hepa titis-B, umur pemberian

kurang dari 7 hari sebanyak satu kali; (2) BCG, umur pemberian satu bulan sebanyak satu kali; (3) DPT, umur pemberian dua bulan, tiga bulan, dan empat bulan sebanyak 3 kali; (4) Polio, umur pemberian satu, dua, tiga, dan empat bulan sebanyak empat kali; (5) Campak, umur pemberian sembilan bulan sebanyak satu kali.

### Jumlah Kasus Penyakit

Indikator lain yang mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat selain fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah indikator eksternal. Indikator eksternal yang dimaksud adalah jenis penyakit yang ada di wilayah tersebut, sehingga apabila sudah diketahui penyakit yang ada di daerah tersebut tenaga medis akan dengan mudah dapat mengatasinya atau memberikan penyuluhan sebagai salah satu tindak pencegahan agar tidak terjangkit. Terdapat 8 jenis penyakit di Provinsi Papua Barat, yaitu malaria, TB paru, kusta, dan DBD.

Tabel 2.60 Jumlah Kasus Penyakit dan Jenis Penyakit Provinsi Papua Barat, 2014

Malaria	TB Paru	Kusta	DBD
82.487	577	633	77

Sumber: Statistik Indonesia, 2016 (diolah)

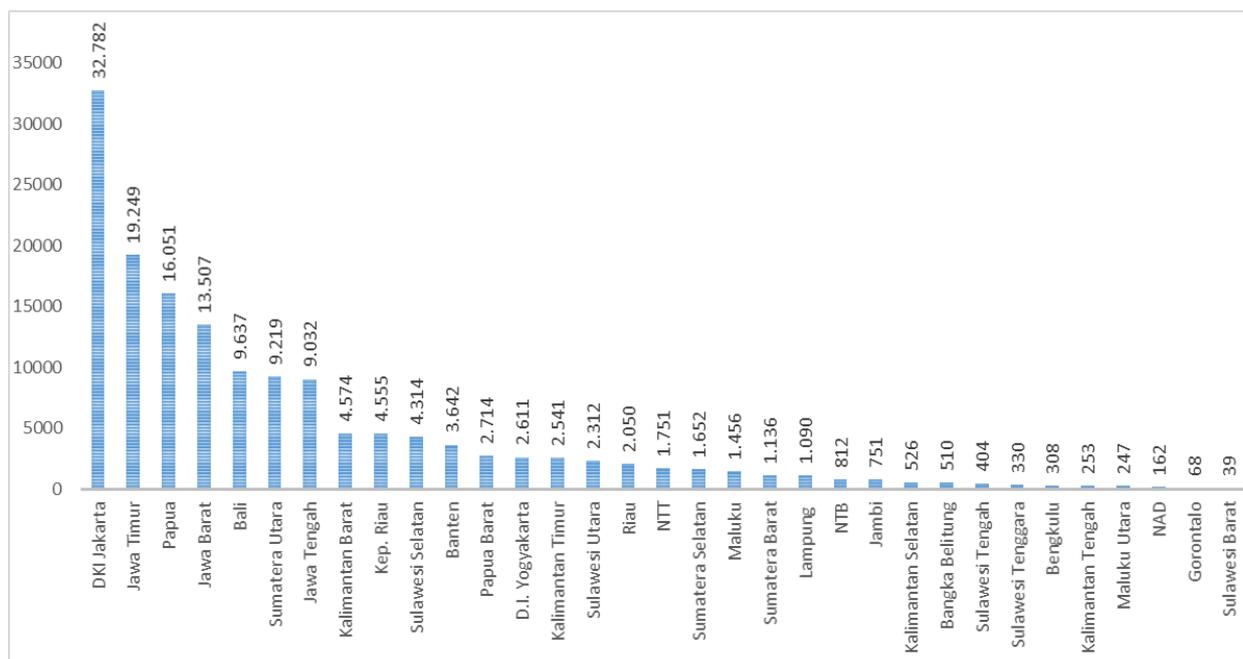
Pada tahun 2014, kasus penyakit terbanyak disumbang oleh malaria sebanyak 82.487 kasus, hal ini dikarenakan Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi endemik malaria, sehingga tidak heran apabila kasus malaria merupakan salah satu jenis penyakit yang diperhatikan di Provinsi Papua Barat. Kemudian, kusta sebanyak 633 kasus, TB Paru sebanyak 577 kasus, dan DBD sebanyak 77 kasus. Jika dibandingkan secara nasional, Provinsi Papua Barat memiliki angka API kedua terbanyak yaitu sebesar 31,29. Sedangkan Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Bali telah berhasil menuntaskan permasalahan ini dan ditunjukkan dengan angka API nol. API merupakan jumlah kasus positif malaria per 1.000 penduduk dalam satu tahun.

### **Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV-AIDS)**

HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* adalah sejenis virus yang menyerang sel darah putih sehingga menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Akibat dari penurunan

kekebalan ini maka tubuh menjadi sangat mudah terkena berbagai penyakit infeksi (infeksi oportunistik) yang sering berakibat fatal. Pengidap HIV perlu mendapatkan penanganan dengan *Antiretroviral* (ARV) untuk menurunkan jumlah virus HIV di dalam tubuh supaya tidak masuk dalam stadium AIDS, sedangkan pengidap AIDS memerlukan pengobatan ARV untuk mencegah terjadinya infeksi oportunistik dengan berbagai komposisinya. Dalam upaya mengendalikan penyebarannya, Pemerintah telah bekerjasama dengan berbagai lembaga terkait di dalam dan luar negeri. Berikut merupakan data jumlah kasus HIV AIDS yang dipantau melalui Aplikasi Sistem Informasi HIV-AIDS dan IMS (SIHA).

Secara nasional jumlah kasus HIV terus meningkat dengan laju yang lebih progresif dibandingkan kasus AIDS. Tercatat 859 kasus terjadi di tahun 1987 dan terus meningkat hingga lebih dari 200 persen selama kurun waktu 20 tahun. Jumlah ini sempat dapat ditekan laju pertumbuhannya sebelum akhirnya menembus angka 29.037 kasus pada tahun 2013. Menuju akhir 2014, jumlahnya berhasil kembali dikontrol dengan penurunan sebanyak 7.000 kasus. Sebaliknya, laju peningkatan kasus AIDS cenderung lebih lambat meskipun dengan trend yang juga positif hingga mencapai titik puncak pada tahun 2012. Berhasilnya program pengendalian AIDS terlihat dari jumlah kasus yang terus menurun secara signifikan hingga mendekati awal tahun 2014.



Gambar 2.38 Jumlah Kasus HIV yang Dilaporkan per Provinsi Tahun 1987 sampai dengan September 2014

Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

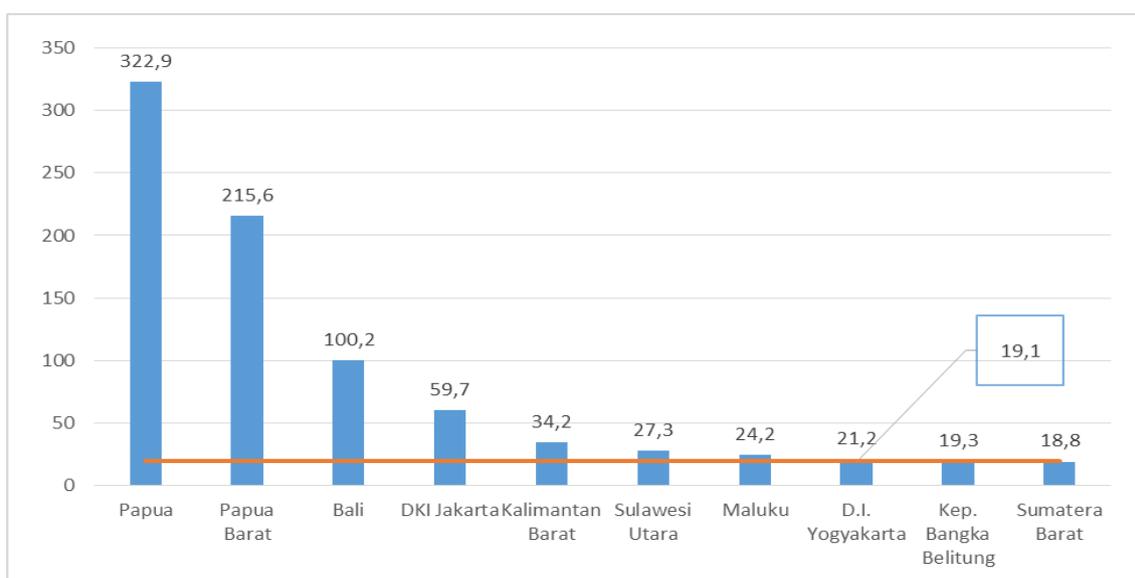
Dari gambar di atas terlihat bahwa jumlah kasus HIV di Provinsi Papua Barat adalah sebanyak 2.714 kasus. Angka ini terbilang rendah apabila dibandingkan dengan provinsi tetangga, Provinsi Papua, yang dilaporkan memiliki jumlah kasus HIV sebanyak 16.051 dan sekaligus menempati ranking ketiga terbanyak. Meskipun demikian, angka ini belum dapat merepresentasikan jumlah penderita yang sebenarnya karena dimungkinkan bahwa ada penderita yang tidak melaporkan diri. Sedangkan untuk kasus AIDS, pada tahun 2014 terdapat 13 kasus baru di Provinsi Papua Barat dengan kasus kumulatif sebesar 1.734 kasus.

Tabel 2.61 Jumlah Kasus Baru AIDS dan Kasus Kumulatif AIDS, 2014

Kasus Baru	Kasus Kumulatif
13	1.734

Sumber: Statistik Indonesia, 2016

Selain itu, kasus AIDS dapat dilihat dengan menggunakan *AIDS Case Rate* atau angka kejadian kasus AIDS. *AIDS Case Rate* adalah jumlah kasus AIDS per 100.000 penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Dalam data tersebut tercatat bahwa Provinsi Papua menduduki angka *AIDS Case Rate* sebesar 322,9, jauh di atas rata-rata nasional yaitu senilai 19,1. Dalam Gambar tersebut tidak tercatat posisi Provinsi Papua Barat dalam peringkat sepuluh besar.



Gambar 2.39 Sepuluh Provinsi dengan *AIDS Case Rate* Tertinggi Tahun 1987 sampai dengan September 2014 (kasus)

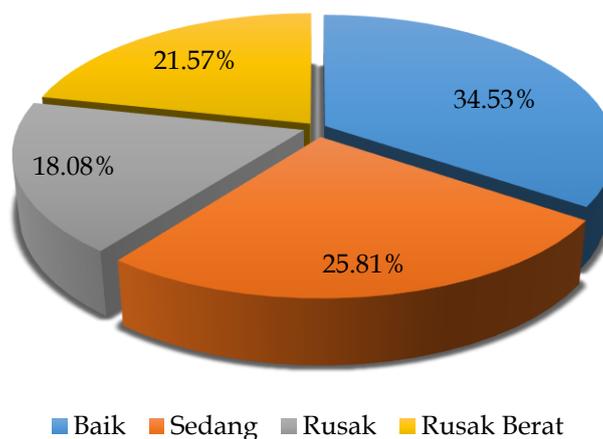
Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2014

### 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kondisi jalan dan infrastruktur lainnya. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

#### Kondisi Jalan

Pembangunan jalan merupakan salah satu aspek penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan membuka aksesibilitas antar wilayah di Provinsi Papua Barat. Jalan merupakan salah satu urat nadi yang mendorong peningkatan perekonomian masyarakat Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2014 panjang jalan Provinsi Papua Barat berdasarkan kondisi jalan mencapai 7.672,53 km, 2.649,71 km atau 34,53% dalam kondisi baik, 1.980,60 km atau 25,81% dalam kondisi sedang, 1.654,97 km atau 21,57% dalam kondisi rusak, dan 1.387,25 km atau 18,08% dalam kondisi rusak berat.



Gambar 2.40 Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan 2014  
Sumber: Statistik Transportasi Provinsi Papua Barat, 2015 (diolah)

Apabila dilihat per kabupaten/kota, Kabupaten Manokwari merupakan kabupaten yang memiliki kondisi jalan baik terpanjang di Papua Barat pada tahun 2014. Panjang jalan

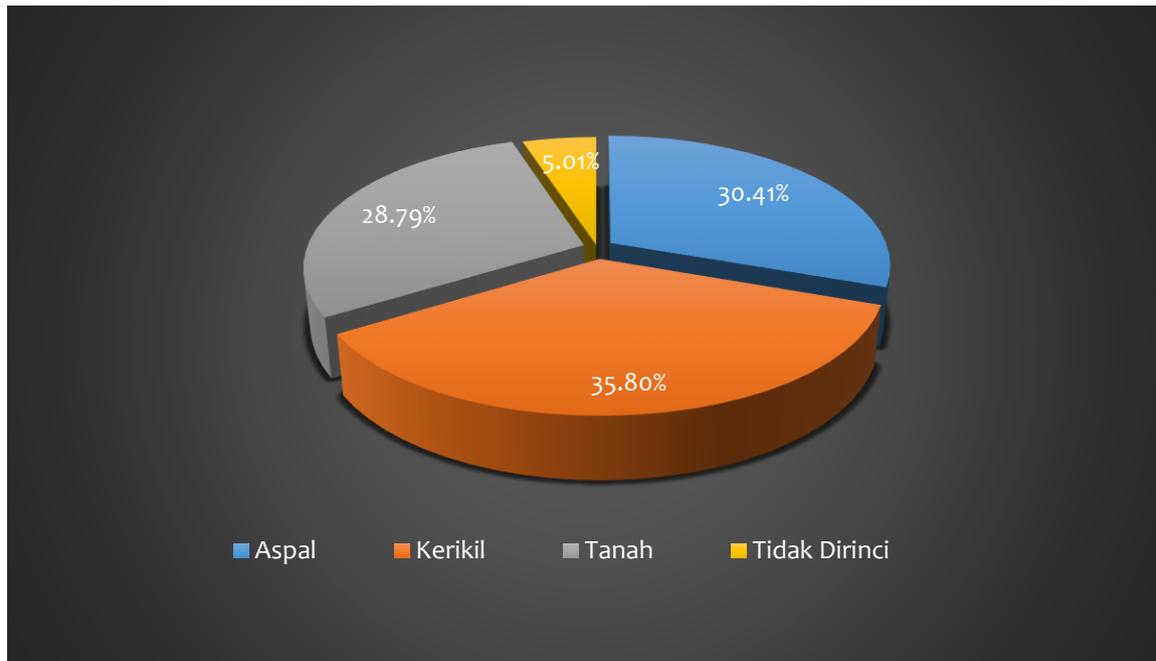
Kabupaten Manokwari mencapai 484,40 km. Sedangkan Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kabupaten dengan kondisi jalan rusak berat terpanjang di Papua Barat pada tahun 2014. Panjang jalan Kabupaten Teluk Bintuni mencapai 574,04 km yang mengalami rusak berat. Kemudian jalan terpanjang berada di Kabupaten Sorong dengan panjang mencapai 1.524,19 km dan jalan terpendek berada di Teluk Wondama dengan panjang 38,93 km.

Tabel 2.62 Panjang Jalan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Menurut Kondisi Jalan 2014 (Km)

Kabupaten/Kota		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
1.	Fakfak	237,79	270,17	76,83	3,38	588,17
2.	Kaimana	202,15	10,45	173,98	172,90	559,48
3.	Teluk Wondama	35,95	0	1,06	1,92	38,93
4.	Teluk Bintuni	76,10	97,64	312,15	574,04	1.059,93
5.	Manokwari	484,40	389,59	271,28	245,83	1.391,10
6.	Sorong Selatan	268,28	101,45	36,00	125,90	531,63
7.	Sorong	360,52	510,71	414,99	237,97	1.524,19
8.	Raja Ampat	163,95	18,66	38,11	23,03	243,75
9.	Tambrau	279,00	382,00	23,00	0	684,00
10.	Maybrat	349,27	62,77	37,00	270,00	719,04
11.	Kota Sorong	192,29	137,16	2,85	0	332,30
<b>Jumlah</b>		<b>2.649,70</b>	<b>1.980,60</b>	<b>1.387,25</b>	<b>1.654,97</b>	<b>7.672,52</b>

Sumber: Statistik Transportasi Provinsi Papua Barat, 2015

Bila dirinci menurut jenis permukaan, 35,80% atau sepanjang 2.601,78 km jalan di Papua Barat berpermukaan kerikil, 30,41% atau sepanjang 2.210,38 km jalan berpermukaan aspal, 28,79% atau sepanjang 2.092,20 km berpermukaan tanah, dan 5,01% atau sepanjang 363,95 km berpermukaan lainnya atau tidak dirinci.



Gambar 2.41 Persentase Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan, 2014  
 Sumber: Statistik Transportasi Provinsi Papua Barat, 2015 (diolah)

Pada jenis permukaan jalan di Papua Barat tahun 2014, aspal terpanjang berada di Kabupaten Manokwari sepanjang 523,08 km dan aspal terpendek berada di Teluk Wondama sepanjang 27,61 km. Kemudian, jalan dengan jenis permukaan kerikil terpanjang berada di Kabupaten Tambrauw sepanjang 501 km dan jalan dengan jenis permukaan kerikil terpendek berada di Kabupaten Teluk Wondama sepanjang 0,92 km. Sedangkan jalan dengan jenis permukaan tanah terpanjang berada di Kabupaten Teluk Bintuni sepanjang 514,65 km dan jalan dengan jenis permukaan tanah terpendek berada di Kabupaten Raja Ampat sepanjang 11 km.

Tabel 2.63 Panjang Jalan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Permukaan Jalan (km), 2014

Kabupaten/Kota	Aspal	Kerikil	Tanah	Tidak Dirinci	Jumlah
1. Fakfak	335,09	138,40	112,99	1,69	588,17
2. Kaimana	149,94	101,65	257,91	50,00	559,49
3. Teluk Wondama	27,61	0,92	12,21	1,20	41,94
4. Teluk Bintuni	80,01	273,13	514,65	192,14	1.059,93
5. Manokwari	523,08	449,09	417,84	1,10	1.391,11
6. Sorong Selatan	144,13	228,60	103,80	55,10	531,63
7. Sorong	229,22	469,38	386,55	31,81	1.116,96
8. Raja Ampat	32,71	169,13	11,00	30,91	243,75
9. Tambrauw	159,00	501,00	24,00	0	684,00
10. Maybrat	209,71	269,33	240,00	0	719,04

11.	Kota Sorong	319,89	1,15	11,26	0	332,30
	<b>Jumlah</b>	<b>2.210,38</b>	<b>2.601,78</b>	<b>2.092,20</b>	<b>363,95</b>	<b>7.268,32</b>

Sumber: Statistik Transportasi Provinsi Papua Barat, 2015

#### 2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perumahan dan kawasan pemukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat. Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya, karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal dan ini berhubungan dengan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

#### Kualitas Perumahan

Berdasarkan data BPS Provinsi Papua Barat (2015), sebagian besar rumah merupakan milik sendiri dengan persentase pada tahun 2014 mencapai 70,88%. Angka ini mengalami sedikit penurunan apabila dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 72,46%. Kemudian sewa berada pada posisi kedua sebesar 10,09%, angka ini juga lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 10,20%.

Tabel 2.64 Persentase Jenis Kepemilikan Rumah Provinsi Papua Barat (%), 2011-2014

Jenis Kepemilikan	2011	2012	2013	2014
Milik Sendiri	67,23	66,79	72,46	70,88
Kontrak	2,57	2,65	2,15	2,29
Sewa	10,63	11,65	10,20	10,09
Bebas Sewa	4,98	4,54	3,05	4,37
Dinas	6,31	6,21	5,75	4,83
Rumah Milik Orang Tua/Sanak/Saudara	7,80	7,83	5,98	7,25
Lainnya	0,48	0,34	0,41	0,29

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2015

Kemudian apabila dilihat dari luas lantai sebagian besar luas lantai rumah di Provinsi Papua Barat memiliki luas lantai > 20 m<sup>2</sup>. Dengan persentase luas terbanyak berada pada

luas antara 20-49 m<sup>2</sup>, sebesar 47,59%. Persentase ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 49,07%. Namun apabila dilihat kembali semua kategori mengalami penurunan persentase pada tahun 2015, kecuali luas lantai 50-99 m<sup>2</sup> yang mengalami kenaikan dari 34,63% pada tahun 2014 menjadi 36,19%.

Tabel 2.65 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai (%), 2011-2015

Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	2011	2012	2013	2014	2015
<= 19	37,80	5,33	5,18	5,50	4,94
20-49	48,63	56,58	49,56	49,07	47,59
50-99	10,53	30,19	34,66	34,63	36,19
100-149	1,60	5,05	7,40	7,36	7,42
150+	1,44	2,85	3,20	3,44	3,86

Sumber: Statistik Indonesia, 2016

Apabila dilihat dari jenis atap rumah, sebagian besar atap rumah di Provinsi Papua Barat terbuat dari seng. Tren penggunaan seng sebagai atap rumah meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2014 mencapai 94,07%. Persentase terendah berada pada penggunaan sirap sebagai atap rumah sebesar 0,31% pada tahun 2014.

Tabel 2.66 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap (%), 2011-2014

Jenis Atap	2011	2012	2013	2014
Beton	1,41	1,93	1,51	1,46
Genteng	1,20	0,97	0,79	0,41
Sirap	0,59	0,31	0,29	0,31
Seng	91,62	92,98	92,51	94,07
Ijuk/Lainnya	3,42	3,25	3,13	2,02
Lainnya	1,77	0,56	1,77	1,73

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat, 2015

Berdasarkan dinding rumah, masyarakat di Provinsi Papua Barat sudah menggunakan dinding berjenis tembok atau menggunakan batu bata. Penggunaan tembok sebagai dinding rumah ini meningkat dari tahun ke tahun dari 54,12% menjadi 58,37% pada tahun 2015. Kemudian masih ada masyarakat yang menggunakan dinding berbahab bambu yaitu sebesar 0,34% pada tahun 2015. Apabila dilihat dari kepemilikan rumah, luas lantai, jenis atap yang digunakan, serta jenis dinding yang digunakan dapat dikatakan bahwa kualitas perumahan di Provinsi Papua Barat ini sudah makin membaik dari tahun ke tahun.

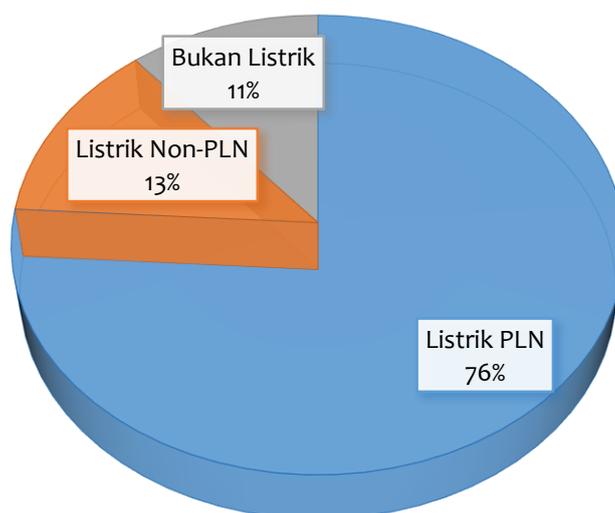
Tabel 2.67 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding (%), 2011-2014

Jenis Dinding	2011	2012	2013	2014
Tembok	54,12	56,00	58,27	58,37
Kayu	41,25	39,89	38,64	39,32
Bambu	0,58	0,43	0,35	0,34
Lainnya	4,04	3,68	2,74	1,97

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat, 2015

### Sumber Penerangan

Berdasarkan data BPS Provinsi Papua Barat (2015), sebagian besar rumah tangga di Provinsi Papua Barat sudah menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utamanya, yaitu sebesar 76%. Sedangkan yang menggunakan listrik non PLN sebagai sumber utama penerangannya sebesar 13% dan yang menggunakan penerangan bukan listrik sebagai sumber penerangannya hanya sebesar 11%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan listrik yang diinisiasi oleh pemerintah telah tersebar merata di sebagian besar wilayah Provinsi Papua Barat.



Gambar 2.42 Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama (%), 2015  
Sumber: Statistik Indonesia, 2016

### Sumber Air Minum

Fasilitas air minum bersih adalah faktor yang sangat menentukan, karena air minum selalu dikonsumsi oleh masyarakat tiap harinya. Dalam satu hari seseorang membutuhkan air minum rata-rata 1,5 liter (sekitar 8 gelas), yang artinya jika satu rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota (ayah, ibu, dan 2 orang anak) maka dalam satu hari rumah tangga tersebut

membutuhkan sedikitnya 6 liter air untuk keperluan minum. Jika kondisi air yang diminum tersebut tidak mempunyai syarat cukup air bersih, maka akan mengakibatkan gangguan kesehatan bagi peminumnya. Dalam publikasi Statistik Kesra BPS disebutkan bahwa yang dimaksud air bersih adalah air minum yang bersumber dari air kemasan, air ledeng, air bor/pompa, air sumur terlindung, dan mata air terlindung yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan limbah terdekat.

Sumber air minum yang digunakan rumah tangga di Provinsi Papua Barat adalah air ledeng, air pompa, air dalam kemasan, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan, dan lainnya. Persentase sumber air minum terbesar di Provinsi Papua Barat berasal dari air dalam kemasan dengan persentase sebesar 36,47%. Kemudian, sumur terlindung sebesar 14,38%, air hujan sebesar 12,48%, mata air terlindung sebesar 8,12%, air permukaan sebesar 7,53%, mata air tak terlindung sebesar 7,03%, air ledeng sebesar 6,36%, sumur tak terlindung sebesar 4,51%, air pompa sebesar 3,08% dan lainnya sebesar 0,03%.

Tabel 2.68 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Untuk Minum (%), 2015

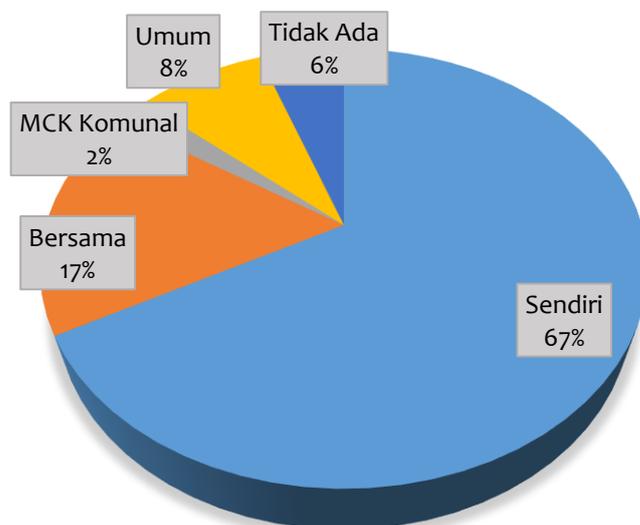
Uraian	Persentase (%)
Ledeng	6,36
Pompa	3,08
Air Dalam Kemasan	36,47
Sumur Terlindung	14,38
Sumur Tak Terlindung	4,51
Mata Air Terlindung	8,12
Mata Air Tak Terlindung	7,03
Air Permukaan	7,53
Air Hujan	12,48
Lainnya	0,03

Sumber: Statistik Indonesia, 2016

### Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Sistem pembuangan kotoran/tinja manusia juga sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan penyakit khususnya penyakit saluran pencernaan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Berdasarkan penggunaan fasilitas toilet di provinsi Papua Barat, sebagian besar toilet yang digunakan adalah milik sendiri, yaitu sebesar 67%. Kemudian penggunaan toilet secara bersama sebesar 17%, toilet umum

sebesar 8%, tidak menggunakan toilet sebesar 6%, dan MCK komunal sebesar 2%. Tingginya kepemilikan sendiri atas toilet menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai menyadari resiko penularan penyakit apabila masih menggunakan toilet bersama atau umum. Namun masih ada permasalahannya dengan ketersediaan toilet di Provinsi Papua Barat sebesar 6% yang masih perlu ditindaklanjuti kembali.



Gambar 2.43 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar (%), 2015

Sumber: Statistik Indonesia, 2016 (diolah)

#### 2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu hal penting yang perlu dijaga untuk memperlancar pembangunan, hal ini tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004. Untuk menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, perlu adanya sebuah kelembagaan yang kuat dan tegas untuk menjaga hal tersebut. Untuk menciptakan kondisi tersebut maka perkembangan angka kriminalitas dan resiko tindak pidana kriminalitas harus terus dipantau.

#### Angka Kriminalitas dan Risiko Terkena Tindak Pidana

Angka kriminalitas merupakan angka yang biasa digunakan untuk mengukur tindak kejahatan. Secara umum angka kriminalitas di Provinsi Papua Barat cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012 hingga 2014 terjadi kenaikan angka kriminalitas dari 1.825 kasus menjadi 3.159 kasus, namun pada tahun 2015 turun menjadi 2.262 kasus. Selain itu, untuk mengukur kriminalitas juga dapat menggunakan risiko penduduk terkena tindak pidana. Risiko penduduk terkena tindak pidana merupakan indeks kemungkinan terjadi kriminalitas atau kejahatan per 100.000 penduduk dihitung dari total kriminalitas per jumlah penduduk per tahun. Perhitungan ini dapat digunakan untuk mengantisipasi jumlah kasus yang akan terjadi karena perhitungannya menggunakan jumlah kasus tindak kejahatan yang sudah terjadi dibagi dengan jumlah penduduk pada waktu yang sama. Di Provinsi Papua Barat hanya ada rasio untuk tahun 2015, yaitu sebesar 160. Hal ini berarti setiap 100.000 penduduk di Provinsi Papua Barat berisiko sekitar 60 orang terkena tindak kejahatan.

Tabel 2.69 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Papua Barat (kasus), 2012-2015

Provinsi	2012	2013	2014	2015
Papua Barat	1.825	2.262	3.159	2.262

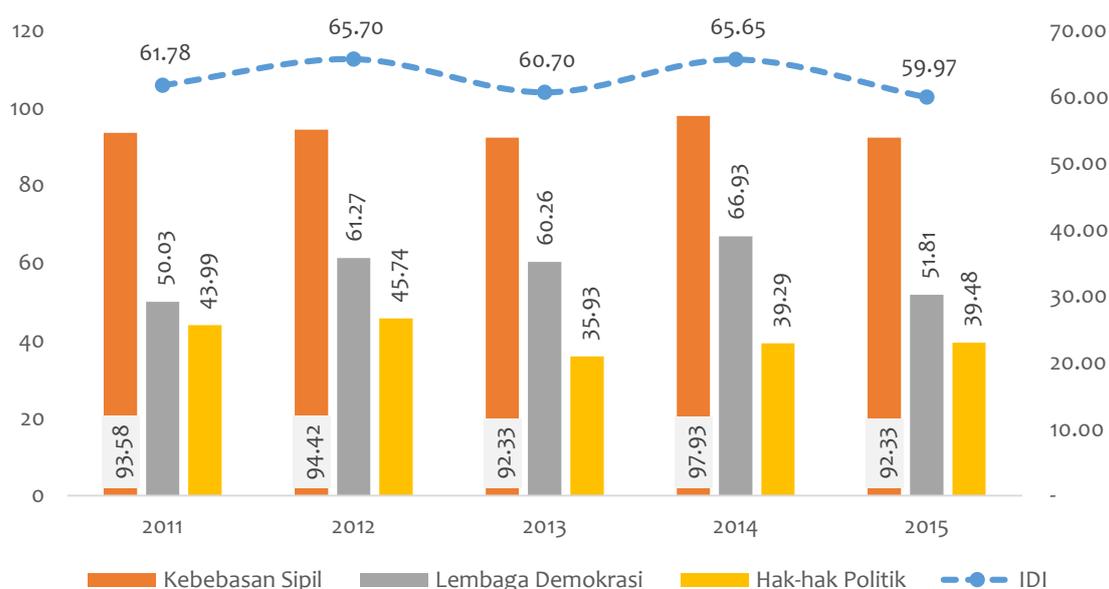
Sumber: Kepolisian Negara Daerah Papua Barat, 2016

### Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks demokrasi Indonesia (IDI) merupakan sebuah alat ukur empiris dan obyektif terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di tanah air. IDI merupakan pengukuran yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia. Dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya, IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia yang terkait dengan realitas demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika relasi antara negara dan masyarakat pada periode pasca reformasi (BPS Provinsi Papua Barat, 2016).

Dalam kurun waktu 2011-2015, perkembangan IDI Provinsi Papua Barat cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011, nilai IDI Provinsi Papua Barat adalah sebesar 61,78 poin, kemudian meningkat menjadi 65,70 poin pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013, nilai IDI mengalami penurunan menjadi 60,70 poin, dan pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi sebesar 65,65 poin. Selama periode 2011-2014, IDI Provinsi Papua Barat termasuk dalam kategori sedang. Namun pada tahun 2015, nilai IDI Provinsi Papua Barat

turun jauh sebesar 5,65 poin menjadi sebesar 59,97 poin sehingga masuk dalam kategori buruk. Angka IDI sendiri sebenarnya merupakan indeks koomposit yang disusun dari tiga aspek yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Pada tahun 2015, nilai aspek kebebasan sipil adalah sebesar 92,33 pin, aspek hak-hak politik sebesar 39,48 poin, dan aspek lembaga demokrasi sebesar 51,81 poin. Dalam perkembangan pengukuran IDI di Provinsi Papua Barat, aspek kebebasan sipil merupakan aspek yang selalu masuk dalam kategori baik, sedangkan aspek lembaga demokrasi merupakan aspek yang berkontribusi besar dalam merosotnya IDI Provinsi Papua Barat pada tahun 2015.



Gambar 2.44 Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Papua Barat, 2011-2015  
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 (diolah)

Menurut BPS Provinsi Papua Barat, salah satu faktor merosotnya IDI adalah aspek lembaga demokrasi yaitu peran birokrasi pemerintah yang turun cukup signifikan. Tahun 2014 nilai indeks variabel ini sempurna yakni 100,00 turun hampir 50% menjadi 44,50 pada tahun 2015. Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut adalah belum tersedianya informasi APBD Pemprov Papua Barat yang dapat diakses oleh masyarakat. Dari 12 item struktur APBD yang harusnya ada pada website resmi pemerintah daerah, belum ada satupun yang dipublikasikan ke masyarakat luas. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat segera menindaklanjuti hal ini dengan menyediakan informasi APBD di website resmi Pemprov Papua Barat.

### 2.3.1.6. Sosial

Pembangunan bidang sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia yang fokus sasarannya diarahkan kepada pembangunan sumberdaya manusia di bidang sosial yang sebaik-baiknya serta menciptakan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis. Sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini maka perkembangannya penyandang masalah kesejahteraan sosial turut berkembang baik secara kuantitas maupun kompleksitasnya dan tidak hanya berbentuk permasalahan kesejahteraan sosial kontemporer.

Perlindungan dan tingkat kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran baik anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketunasosialan, bencana alam, dan bencana sosial. Penanganan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya fakir miskin, apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan terisolasi.

### Agama dan Kepercayaan

Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnya terutama kaum generasi muda. Generasi muda mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. Untuk itu diperlukan sarana/tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama. Pembangunan sektor agama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa karena agama mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan.

Tabel 2.70 Persentase Penduduk Menurut Jenis Agama, 2015

Agama	Persentase (%)
Islam	33,149
Protestan	57,958
Katholik	8,521
Hindu	0,188